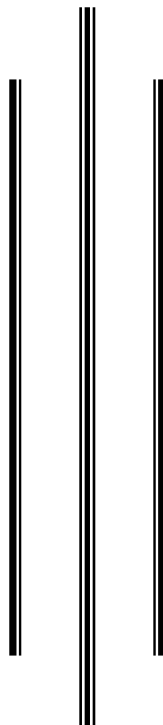




**RENCANA KERJA
ITWASDA POLDA SUMBAR
TAHUN ANGGARAN 2024**





KEPUTUSAN ITWASDA POLDA SUMATERA BARAT

Nomor : Kep/32/IX/REN.2.3./2023

Tentang

RENCANA KERJA ITWASDA POLDA SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH SUMATERA BARAT

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Itwasda Polda Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu menetapkan Keputusan ini.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 3. Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Daerah;
 6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor;
 7. Keputusan Kapolda Sumbar Nomor: Kep/347/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Renstra Polda Sumbar Tahun 2020-2024.

2 KEPUTUSAN IRWASDA POLDA SUMBAR
NOMOR : KEP/32/IX/REN.2.3./2023
TANGGAL: 19 SEPTEMBER 2023

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kapolda Sumbar Nomor: Kep/306/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Rencana Kerja Kepolisian Daerah Sumatera Barat TA. 2024;
 2. Pagu Indikatif Itwasda Polda Sumbar T.A. 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN IRWASDA POLDA SUMATERA BARAT TENTANG RENCANA KERJA ITWASDA POLDA SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024.**

1. Rencana Kerja Itwasda Polda Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan sebagai Pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024;
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Padang
pada tanggal: 19 September 2023

INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA SUMBAR



ARIF RAHMAN HAKIM, S.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050542

DAFTAR ISI

	Halaman
I. LATAR BERLAKANG	
1. Kondisi Umum	1
a. Perkembangan Aspek Kehidupan	3
b. Analisis	24
2. Identifikasi Masalah	24
II. TUJUAN DAN SASARAN	
3. Visi dan Misi	25
a. Visi Polda Sumbar dan Visi Itwasda Polda Sumbar.....	25
b. Misi Polda Sumbar dan Misi Itwasda Polda Sumbar.....	25
4. Tujuan	27
a. Tujuan Polda Sumbar Tahun 2024	27
b. Tujuan Itwasda Polda Sumbar Tahun 2024	27
5. Sasaran Prioritas Tahun 2024	27
a. Sasaran Prioritas Polda Sumbar	27
b. Sasaran Prioritas Itwasda Polda Sumbar.....	28
III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
6. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Sumbar Tahun 2024	28
7. Arah Kebijakan dan Strategi Itwasda Polda Sumbar Tahun 2023 ..	53
IV. PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2023	
8. Program kegiatan	55
9. Pagu Indikatif	56
V PENUTUP	
10. Penutup	57
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. RKT	
2. RKA-KL	

**RENCANA KERJA
ITWASDA POLDA SUMBAR
TAHUN ANGGARAN 2024**

I. Latar Belakang

1. Kondisi Umum

Tahun 2024 merupakan tahun kelima dari tahapan Rencana Strategis Itwasda Polda Sumbar 2020-2024 dan sebagai kelanjutan dari Rencana Kerja Itwasda Polda Sumbar T.A. 2023, sehingga perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Itwasda Polda Sumbar T.A. 2024. Rencana Kerja T.A. 2024 Itwasda Polda Sumbar ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategi Itwasda Polda Sumbar 2020-2024. disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

Itwasda Polda Sumbar telah menunjukkan keberhasilan melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan indikator, menurunnya pelanggaran atau kesalahan administrasi, terlaksananya Operasi Kepolisian di Jajaran Polda Sumbar berjalan sebagaimana aturan yang berlaku, menurunnya jumlah pengaduan masyarakat atas perilaku anggota Polri khususnya Polda Sumbar dilapangan, terlaksananya kegiatan verifikasi, terwujudnya laporan satuan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan serta mewujudkan pelayanan maksimal terhadap setiap pengaduan dari masyarakat.

Itwasda bertugas menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polda untuk memberikan penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi serta pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga eksternal. Dalam melaksanakan tugas Itwasda menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
- b. Pengawasan untuk memberikan penjaminan kualitas dengan cara:
 - 1) Audit penyelenggaraan manajemen di bidang operasional, Sumber Daya Manusia (SDM), logistik dan anggaran keuangan (Garkeu);
 - 2) Reviu;
 - 3) Pemantauan Tindak Lanjut (PTL); dan
 - 4) Evaluasi.
- c. pemberian konsultasi, sosialisasi dan asistensi;
- d. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pengawasan;
- e. penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh instansi, masyarakat atau pegawai negeri pada Polri; dan
- f. pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Itwasda Polda Sumbar di dukung oleh Subbag dan Irbid. Tugas dan fungsi Subbag dan Irbid dapat kita lihat pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

Perkembangan lingkungan strategis nasional harus dilihat dari faktor-faktor Ipoleksosbud dan keamanan yang senantiasa berubah disetiap daerah. Semua isu strategis baik global, nasional dan regional tersebut harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Itwasda Polda Sumbar T.A. 2024.

Dalam perkembangan lingkungan strategis regional masih terdapat isu terkait dengan daerah perbatasan, baik darat maupun laut, pencemaran lingkungan, penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19), pemberlakuan MEA, pengiriman TKI maupun penerimaan TKA dan perkembangan paham radikalisme serta terorisme.

Selanjutnya kondisi internal dan eksternal Polda Sumatera Barat yang dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan lingkungan strategis yang akan digambarkan sebagai berikut:

a. Perkembangan Aspek Kehidupan

1). Geografi

- a) Provinsi Sumatera Barat terletak antara 0°54' Lintang Utara sampai 3°30' Lintang Selatan serta 98°36' sampai 101°53' Bujur Timur dengan luas total wilayah sekitar 42.012,89 Km² atau luas tersebut setara dengan 2,17 % dari luas Republik Indonesia, Provinsi Sumatera Barat terletak disebelah Barat pulau Sumatera.
- b) Sumatera Barat merupakan daerah rentan terjadinya gempa bumi baik didarat maupun dilaut disebabkan karena wilayah sumbar terletak diatas lempeng eurasia dan lempeng Indo australia yang mempunyai beberapa retakan antara lain: retakan/patahan disepajang pulau sumatera (patahan semangka) mulai dari wilayah Aceh sampai ke Lampung dan retakan/patahan Mentawai Antara pulau Sumatera dengan Pulau Mentawai serta patahan sebelah barat pulau Mentawai bagian barat Kep. Mentawai (antara batas lempeng eurasia dgn lempeng australia / zona subduksi sumatera) dimana lempeng australia bergerak mendorong lempeng eurasia dengan kecepatan ± 7 cm / tahun ke arah timur laut serta adanya 2 (dua) gunung yang masih aktif yaitu Gunung Merapi di daerah Bukittinggi/Tanah Datar dan dan Gunung Talang di wilayah Kabupaten Solok, sehingga Sumbar merupakan daerah rawan bencana Gempa bumi berupa gunung meletus maupun gempa bumi tektonik yang berpotensi timbulnya tsunami.
- c) Sumatera Barat Wilayah Sumatera Barat merupakan jalur perlintasan yang menghubungkan antar Provinsi di pulau Sumatera melalui jalur darat dan berbatasan secara langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi dan Propinsi Bengkulu yang mobilitasnya sangat padat dan rentan terjadinya

konflik perbatasan, konflik sosial, konflik agraria perkebunan, tambang, penyelundupan dan kriminalitas lainnya.

- d) Wilayah Sumatera Barat yang memiliki luas lebih kurang 42.297,30 km berupa daratan dan lautan terdiri dari 391 Pulau pulau kecil dan besar yang berhadapan dengan samudera Hindia yang merupakan perlintasan jalur ekonomi internasional yang rentan terjadinya gangguan kamtibmas (penyelundupan, terorisme, pencurian ikan, illegal logging, narkoba dan kejahatan transnasional lainnya).
- e) Sumatera Barat mempunyai 19 Kabupaten/Kota dengan Kabupaten Mentawai memiliki wilayah terluas yaitu 6,01 ribu Km² atau sekitar 14,21% luas Propinsi Sumatera Barat, sedangkan Kota Padang Panjang memiliki luas daerah terkecil yaitu 23,0 Km² atau 0,05% dari luas propinsi Sumbar.
- f) Alam Sumatera Barat meliputi kawasan lindung yang mencapai sekitar 45,17% dari luas keseluruhannya, sedangkan lahan yang sudah dimanfaatkan untuk budidaya baru tercatat sebesar 23.19,11 Km² atau sekitar 54,83% dari kawasan seluruhnya.
- g) Sumatera Barat juga memiliki empat danau yang indah yaitu danau singkarak, danau diatas dan danau dibawah terletak di Kabupaten Solok, danau maninjau terletak di Kabupaten Agam serta terdapat gugusan gunung yang hampir diseluruh Kabupaten / kota gunung yang paling tinggi adalah gunung Talamau di kabupaten Pasaman Barat dengan ketinggian 2.913 meter dari permukaan laut serta adanya gunung yang aktif masing-masing Gunung Merapi di wilayah Kab/Kota Padang Panjang/Tanah Datar, Gunung Talang terletak di Kabupaten Solok.
- h) Alam Sumatera Barat meliputi kawasan lindung yang mencapai sekitar 45,17% dari luas keseluruhannya, sedangkan lahan yang sudah dimanfaatkan untuk budidaya baru tercatat sebesar 23.19,11 Km² atau sekitar 54,83%dari kawasan seluruhnya.

2). Demografi

- a) Jumlah penduduk Sumbar berdasarkan tahun 2022 sebanyak 5.640.629 jiwa terdiri laki-laki sebanyak 2.841.802 jiwa dan perempuan sebanyak 2.798.827 jiwa, Menurut kabupaten dan kota jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kota Padang 919.145 jiwa sedangkan Kota Padang Panjang merupakan daerah yang paling sedikit penduduknya 57.850 jiwa, Kota yang terpadat penduduknya adalah Bukittinggi yaitu mencapai 5.102 jiwa/ km², sedangkan kabupaten yang terjarang penduduknya adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, hanya 15 jiwa/km².

Tingkat

- b) Tingkat kepadatan penduduk Sumatera Barat tahun 2022 rata-rata 132/KM2, kepadatan penduduk tertinggi di Kota Bukittinggi hampir 4.941/Km2 dan penduduk terjarang adalah Kab. Kepulauan Mentawai yaitu 14,46 orang per Km2. Penduduk Sumbar Mayoritas terdiri dari suku Minangkabau, sedangkan dalam jumlah kecil terdiri suku Jawa, Batak, Aceh, Melayu, Nias, Cina.
- c) Penduduk Provinsi Sumatera Barat yang mayoritas beragama Islam, sehingga berpengaruh terhadap pola pikir dan landasan moral serta sepiritual masyarakat, Namun keberadaan agama lainnya tetap memperoleh tempat untuk berkembang, Sikap solidaritas dan kerukunan hidup antar umat beragama masih tetap terpelihara, hal ini menjadi salah satu potensi yang menguntungkan bagi pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.
- d) Pertambahan penduduk di Sumatera Barat setiap tahun sekitar 1 s/d 2 % dengan penyebarannya yang tidak merata serta terjadinya peningkatan angkatan kerja sedangkan lapangan kerja sangat terbatas/tidak seimbang sehingga terjadinya kepadatan penduduk di beberapa wilayah di Sumbar, makin tingginya pengangguran dan kemiskinan sehingga rentan terjadinya gangguan kamtibmas.
- e) Propinsi Sumatera Barat juga merupakan wilayah yang didiami oleh penduduk yang heterogen dari berbagai macam agama dengan prosentase pemeluk agama tahun 2022:
 - (1) Agama Islam sebanyak 97,6 %
 - (2) Agama Protestan sebanyak 1,5 %
 - (3) Agama Khatolik sebanyak 0,84 %
 - (4) Agama Hindu sebanyak 0,0056 %
 - (5) Agama Budha sebanyak 0,84 %
 - (6) Agama lainnya sekitar 0,0158 %

3) Sumber Daya Alam

- a) Sumber Daya Alam di Propinsi Sumatera Barat sebagai penghasil Devisa Negara relatif kecil dibandingkan dengan propinsi lain disektor pertanian adalah Cacao, Cengkeh, kelapa sawit, gambir, kulit manis, disektor industri adalah semen padang, kondisi tersebut disamping jumlahnya relatif kecil dan belum tereksplorasi sepenuhnya dikarenakan belum adanya Sumber Daya Manusia yang mumpuni, disamping adanya indikasi investor asing takut masuk ke Sumbar dikarenakan adanya polemik dan masalah pembebasan tanah yang cukup rumit dan sulit, sehingga memberatkan para investor itu sendiri bila akan menanamkan sahamnya ke Wilayah Sumbar.

b) Sumber

- b) Sumber daya alam lainnya yang potensial dikembangkan di wilayah Sumatera Barat adalah kelautan, Perikanan, keindahan alam pesisir pantai dan laut seperti di Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat sedangkan kepulauan Mentawai berupa keindahan Pantai dan Keindahan alam bawah laut, untuk kegiatan menyelam dan berenang, surfing/peselancar serta pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk wisata.
- c) Masyarakat Sumatera Barat memiliki budaya yang khas serta memiliki keindahan alam yang mengagumkan sehingga dikenal sebagai daerah tujuan wisata baik lokal, nasional maupun mancanegara. Kota Bukittinggi merupakan suatu daerah yang beriklim sejuk dikelilingi oleh gunung-gunung dengan nagari-nagari tradisional serta tatanan kehidupan yang masih bertahan selama berabad-abad, Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi dengan mempunyai ciri khas masakan Padang yang terkenal sampai ke Mancanegara, sehingga setiap orang yang pernah berkunjung ke sumbar selalu terkesan dan tidak mudah melupakan keindahannya.
- d) Sebagai dampak lingkungan terhadap pengelolaan Sumber daya alam yang tidak dikelola secara profesional dan provosionl menyebabkan terjadinya bebarapa pelanggaran hukum seperti illegal meaning, illegal logging, illegal phising/pencurian ikan dapat berdampak negatif, disamping rusaknya ekosistem yang ada disekitar lokasi, terjadinya hutan gundul yang dapat mengakibatkan terjadinya bencana alam banjir/tanah longsor yang merugikan masyarakat setempat maupun kerugian negara.
- e) Kekayaan alam khususnya kelautan memiliki potensi ikan sebagai penghasil Devisa negara namun dengan terbatasnya sumber daya manusia yang kurang handal sehingga potensi tersebut belum bisa dimanfaatkan secara optimal.
- f) Luas hutan di wilayah Sumatera Barat menunjukkan semakin terjadinya penurunan setiap tahunnya akibat adanya alih fungsi baik secara resmi yang dilakukan oleh pemerintah setempat terkait dengan adanya pemekaran wilayah dengan perubahan RT/RW atau dengan secara illegal yang dilakukan masyarakat setempat untuk dijadikan lahan pertanian atau perkebunan dari data tahun 2019 hutan yang ada di wilayah Propinsi Sumatera Barat sebagai berikut:
- | | |
|----------------------------------|---------------|
| (1) Hutan lindung seluas | : 923.246 Ha. |
| (2) Hutan Suaka alam dan wisata | : 773.434 Ha. |
| (3) Hutan Produksi terbatas | : 216.233 Ha |
| (4) Hutan Produktip tetap seluas | : 429.281 Ha |

4) **Ideologi**

- a) Berkembangnya berbagai aliran kepercayaan di beberapa wilayah Indonesia termasuk aliran radikal yang baru-baru ini muncul yaitu ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) yang menginginkan perubahan ideologi Pancasila menjadi syariah yang berkedok Islam, hal tersebut sangat bertentangan dengan Pancasila sebagai azas negara di Indonesia, Kelompok Islam radikal ini akan terus berupaya menyebarkan pengaruhnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk Sumatera Barat.
- b) Pengaruh situasi global dari negara barat saat ini, dimana masyarakat merasa mendapat suatu kebebasan dalam berdemokrasi khususnya dalam membentuk suatu organisasi termasuk organisasi yang akan menghidupkan kembali paham ideologi komunis, di Sumbar sejak tahun 2012 (di Kota Padang, Bukittinggi, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Tanah Datar, Kab. Solok dan Padang Panjang) telah menemukan organisasi /kelompok / aktivis yang tergabung dalam YPKP (Yayasan Penelitian Korban Peristiwa) 1965 / 1966 dan pada tahun 2015 pada saat DPP YPKP Sdr. Bejo Untung akan melakukan pelantikan salah satu ketua DPC YPKP Kota Bukittinggi di Bukittinggi mendapat protes keras dari masyarakat Kota Bukittinggi sehingga rencana pelantikan PDC YPKP Bukittinggi batal dilaksanakan karena di protes oleh masyarakat sekitar.

5) **Politik**

- a) Kondisi Politik secara Nasional masih dihadapkan pada upaya untuk melanjutkan reformasi disegenap aspek kehidupan nasional dengan bertumpu pada prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila yang telah ditetapkan sebagai dasar negara. Hasil pembangunan politik dirasakan masih kurang antara lain tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga politik semakin merosot karena makin banyak elite politik yang terjerat kasus korupsi dan tidak ada keteladanan serta eforia yang kebablasan yang mengakibatkan norma-norma hukum dan kepatutan yang berlaku dimasyarakat dileranggar.
- b) Munculnya kelompok-kelompok baru yang tidak puas dengan sistem politik dan kehidupan partai politik sekarang ini mereka berobsesi mencitakan sistem politik baru dengan menolak format politik yang berlaku sekarang, kelompok ini biasanya berada di level akar rumput mengagregasi kepentingan rakyat yang paling riil yang mudah diartikulasikan menjadi isu politik dengan arah gerakannya adalah sebagai berikut :

1) Mendelegitimasi.....

- (1) Mendelegitimasi partai dan sistem politik sekarang melalui issukorupsi.
 - (2) Memobilisasi massa dan melakukan tekanan ekstra parlementer.
 - (3) Memasuki gelanggang politik dengan mengkampanyekan calon independen ataupun partai politik lokal.
- c) Sistem Politik dalam negeri menganut sistem demokrasi sesuai nilai nilai Pancasila yang mengedepankan azas musyawarah untuk mufakat namun realitanya demokrasi liberal lebih menonjol dalam sistem proses pengambilan keputusan yakni melalui mekanisme voting yang berlaku dari pusat sampai ke tingkat daerah.
- d) Struktur Politik saat ini masih menghadapi berbagai tuntutan masyarakatantara lain:
- (1) Masih banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara maupun pejabat tingkat daerah sehingga terkesan bahwa para pejabat belum bisa dijadikan panutan/ccontoh teladan bagi masyarakat luas.
 - (2) Pelayanan publik yang dianggap masyarakat belum baik sebagai akibat sikap mental yang masih berorientasi kepada kepentingan pribadi dan kelompok, tanggung jawab pekerjaan pada instansi /lembaga masih tumpang tindih serta birokrat belum mendapat imbalan penghasilan yang memadai sesuai yang diharapkan sehingga sering terjadi pelanggaran hukum / korupsi hampir di semua instansi pemerintah baik ditingkat pusat sampai ke tingkat daerah.
 - (3) Perkembangan netralitas birokrasi masih semu sebagai akibat adanya aturan bahwa partai politik berhak menetapkan calon pimpinan pemerintah pusat maupun pimpinan daerah disamping Sistem Multi partai saat ini belum sepenuhnya mampu menghasilkan pemerintah yang kuat karena di negara Indonesia tidak menganut sistem oposisi yang mengontrol dan mengkritisi kebijaksanaan pemerintah.
 - (4) Proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan nasional masih didominasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) parpol melalui wakil rakyat dan elite politik yang berada di kursi pemerintah , musyawarah untuk mufakat yang merupakan amanat pembukaan UUD 1945 tidak terimplementasi secara konsisten ini terlihat dari dominasi peran fraksi dari pada peran wakil rakyat pengambilan keputusan lebih cenderung menggunakan model Voting.

e) Budaya.....

- e) Budaya politik dalam berdemokrasi kondisinya belum menunjukkan iklim dan budaya politik yang benar, budaya politik masih bersifat parokial, primordial, oportunistis, nepotis feodal dan anarkis indikatornya antara lain masih adanya pengerahan kekuatan massa politik sebagai kelompok penekan yang bernuansa kekerasan dan destruktif.
- f) Budaya paternalistik masih kuat pengaruhnya pada konteks pemilihan kepemimpinan etika politik belum sepenuhnya mempedomani prinsip-prinsip demokrasi hal ini terlihat banyaknya pemaksaan kehendak dan adanya kelompok yang tidak siap kalah dalam pertarungan politik. Figur kharismatik masih menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan partai.
- g) Kebebasan Pers sangat dinamis dan belum diimbangi oleh tanggung jawab sesuai etika jurnalistik sehingga mengarah kepada kebebasan tanpa batas dan tidak tanggung jawab serta cenderung mengabaikan etika terhadap berbagai pemberitaan, Media massa masih mengutamakan kepentingan keuntungan bisnis dibandingkan dengan resiko sosial politik.
- h) Sisten hukum nasional belum berjalan maksimal yang meliputi substansi hukum, kelembagaan, sarana dan prasarana dan budaya hukum sebagai akibat dari pembangunan hukum yang belum selesai secara tuntas, Perumusan perundang-undang belum sepenuhnya berorientasi kepada kepentingan masyarakat umum disebabkan sebagian penyusun undang-undang lebih mengedepankan kepentingan politik sesaat dari pada kepentingan nasional.
- i) Penegakan hukum masih dihadapkan belum optimalnya kinerja aparat penegak hukum, selain itu masih terjadi mafia peradilan dan diskriminasi dalam penerapan hukum faktor lain yang dapat menghambat penegakan hukum disebabkan integritas, moralitas dan profesionalisme penegak hukum hingga saat ini masih belum sepenuhnya mendukung pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
- j) Jumlah Nagari di wilayah Sumbar tahun 2022 sebanyak 1.228 nagari yang merupakan Pemerintah terendah dibawah Kecamatan ternyata belum mempunyai batas wilayah secara hukum akan tetapi batas ditentukan menurut hukum adat setempat sehingga hal ini merupakan kerawanan dimasa yang akan datang yakni terjadinya permasalahan konflik sosial berupa kasus keagrariaan/pertanahan, batas wilayah, pertambangan dan masalah perkebunan.

k) Partisipasi.....

- k) Partisipasi masyarakat untuk memilih calon Legislatif mulai dari DPRD Kab/Kota, Provinsi dan DPR RI serta DPD RI sangat tinggi, karena pelaksanaannya di lakukan serentak dengan pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI, dari pelaksanaan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden tahun 2014 yang mencapai 71 %, sementara pada pelaksanaan Pilpres tahun 2019 di Sumbar mencapai 79,6 %. Namun pada pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur terjadi penurunan partisipasi masyarakat yaitu dengan menjadi hanya 65,42 %.
- l) Suhu Politik secara Nasional pasca dilaksanakan pesta Demokrasi Pileg dan Pilpres 2019 relatif aman dan kondusif serta situasi Politik pasca pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 baik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di wilayah Sumbar pada umumnya dalam keadaan relatif aman walaupun terjadi gejolak politik secara nasional namun di Sumbar masih tetap bisa terkendali serta menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 situasi saat ini telah membawa beberapa perubahan besar dari dinamika politik yang ada, diantaranya munculnya partai - partai baru untuk menjadi peserta konstetasi politik di tahun 2024, munculnya serta pergerakan dari beberapa Tokoh Nasional / Pejabat yang di gadang-gadang menjadipasangan presiden 2024.
- m) Isu-isu kebijakan pemerintah yang kontroversi serta problematika lama yang belum tuntas di masyarakat yaitu transparansi RUU KHUP, RUU Omnibuslaw, Pembangunan IKN.
- n) Suhu Politik wilayah Propinsi Sumatera Barat tahun 2024 diperkirakan akan menegang menjelang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, dikarenakan dengan telah dimulainya rangkaian tahapan pileg, Pilpres, dan pemilihan kepala Daerah tahun 2024.
- o) Jadwal Pemilu Serentak tahun 2024 untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta anggota DPD RI akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sedangkan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024.

p) Telah.....

- p) Telah berlangsung beberapa rangkaian tahapan Pemilu serentak tahun 2024 yaitu saat ini sedang berlangsung tahap Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta penetapan nomor urut Partai Politik peserta Pemilu 2024 diantaranya :
- (1) Nomor Urut 1 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
 - (2) Nomor Urut 2 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
 - (3) Nomor Urut 3 PDI Perjuangan
 - (4) Nomor Urut 4 Partai Golongan Karya (Golkar)
 - (5) Nomor Urut 5 Partai NasDem
 - (6) Nomor Urut 6 Partai Buruh
 - (7) Nomor Urut 7 Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
 - (8) Nomor Urut 8 Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
 - (9) Nomor Urut 9 Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
 - (10) Nomor Urut 10 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
 - (11) Nomor Urut 11 Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
 - (12) Nomor Urut 12 Partai Amanat Nasional (PAN)
 - (13) Nomor Urut 13 Partai Bulan Bintang (PBB)
 - (14) Nomor Urut 14 Partai Demokrat
 - (15) Nomor Urut 15 Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
 - (16) Nomor Urut 16 Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
 - (17) Nomor Urut 17 Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
 - (18) Nomor Urut 24 Partai Ummat

6) **Ekonomi**

- a) Kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih relatif baik, terlihat dari cukup stabilnya pertumbuhan ekonomi dan terjaganya inflasi di dalam negeri dimana inflasi sekitar 4,2%, pertumbuhan 5,01%. Kemudian juga dalam situasi lain, ekonomi Indonesia dibanding negara lain, *debt to GDP* ratio sekitar 42%. Defisit juga tercatat masih di sekitar 4%, transaksi berjalan 0,5%,”
- b) Neraca Perdagangan Indonesia selama 26 bulan terakhir terus mencatatkan nilai yang positif bahkan surplus. Indonesia juga masih mempunyai cadangan devisa sebesar US\$135 miliar. Situasi domestik relatif baik. Beberapa negara sudah masuk resesi, namun potensi resesi di Indonesia relatif sangat kecil jika dibandingkan negara lain, yaitu sekitar 3%.

c) Stabilitas

- c) Stabilitas sistem keuangan Indonesia berada dalam kondisi normal di tengah tekanan eksternal yang meningkat akibat perang Rusia-Ukraina. Pemulihan ekonomi Indonesia tetap terjaga terutama ditopang dengan meredanya atau makin baiknya penanganan Covid-19 dan diikuti oleh pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat yang kemudian makin mendorong kegiatan perekonomian di dalam negeri.
- d) Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap kuat yang didukung oleh kegiatan konsumsi masyarakat/rumah tangga, kegiatan investasi, serta dukungan belanja pemerintah. Kinerja ekspor yang dalam hal ini mengalami peningkatan sangat signifikan namun tetap harus diwaspadai dengan adanya perkembangan perdagangan ekonomi global dan juga pertumbuhan ekonomi global yang terancam akibat terjadinya perang di Ukraina.
- e) Sejumlah indikator ekonomi masih tercatat baik, seperti indeks keyakinan konsumen, penjualan eceran, *index growth* dari kendaraan penjualan kendaraan bermotor, konsumsi semen dan konsumsi listrik. Dari sisi eksternal, surplus neraca perdagangan meningkat mencapai USD3,83 Miliar. Hal tersebut juga didukung oleh adanya kenaikan surplus neraca perdagangan non migas terutama dengan meningkatnya harga-harga komoditas global seperti batu bara, besi, baja serta CPO.
- f) Cadangan devisa Indonesia pada Maret 2022 mencapai USD 139,1 Miliar atau setara pembiayaan 7,2 bulan impor atau 7,0 bulan impor dan pembiayaan utang luar negeri Pemerintah. Cadangan devisa ini berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
- g) Di sisi nilai tukar, nilai tukar Rupiah Indonesia pada triwulan I 2022 tetap terjaga dan hanya mengalami sedikit depresiasi sebesar 0,33% secara rata-rata dibandingkan posisi akhir tahun 2021. Depresiasi rupiah tersebut lebih rendah dibandingkan mata uang sejumlah negara berkembang lainnya seperti Malaysia, India, dan Thailand.
- h) Inflasi hingga Maret 2022 juga tetap terkendali pada tingkat 2,64% *year on year*. Hal ini didukung oleh masih cukup terkendalinya sisi penawaran di dalam merespon kenaikan permintaan, dan juga tetap terkendalinya ekspektasi inflasi, stabilitas nilai tukar Rupiah, serta berbagai respon kebijakan yang dilakukan pemerintah terutama di dalam menjaga barang-barang yang diatur oleh pemerintah.

i) Meskipun

- i) Meskipun demikian, sejumlah risiko rambatan yang berasal dari kondisi global akan berpotensi mempengaruhi dari sisi inflasi, cost of fund, dan kinerja perekonomian. Oleh karena itu KSSK tetap mewaspadaikan dan memantau stabilitas sistem keuangan, untuk tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.
- j) Krisis multi dimensional, strategi pembangunan nasional khususnya dibidang perekonomian menggunakan strategi stabilitas ekonomi makro sebagai persyarat bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan , mengingat masih tingginya resiko ketidak pastian perekonomian dunia dan munculnya hambatan - hambatan terhadap ketersediaan pembiayaan sehingga strategis tersebut sebagai perwujudan clean goverment dan good governance belum sepenuhnya berhasil ,sebagai Indikator stabilitas ekonomi makro antara lain :
- (1) Pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan sebesar 5,3 persen, dimana pemerintah akan berupaya maksimal dalam menjaga keberlanjutan penguatan ekonomi nasional. Angka pertumbuhan tersebut didasarkan pada pertimbangan dinamika perekonomian nasional terkini, agenda pembangunan yang akan dicapai, serta potensi risiko dan tantangan yang dihadapi. Untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah akan terus mendorong ekspansi produksi yang konsisten untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Berbagai sumber pertumbuhan baru harus segera diwujudkan. Pelaksanaan berbagai agenda reformasi struktural terus diakselerasi untuk transformasi perekonomian. Investasi harus dipacu serta daya saing produk manufaktur nasional di pasar global, harus ditingkatkan.
 - (2) Dengan semakin kuatnya sektor swasta sebagai motor pertumbuhan, manajemen kebijakan fiskal dapat lebih diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara perbaikan produktivitas dan daya saing. Hal itu dapat dilakukan dengan menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal untuk menghadapi risiko dan gejolak di masa depan. Bauran kebijakan yang tepat, serta sinergi dan koordinasi yang semakin erat antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan menjadi modal yang kuat dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi nasional serta penguatan stabilitas sistem keuangan.
 - (3) Rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak disekitar Rp14.750 per Dolar AS dan rata-rata suku bunga Surat Utang Negara (SUN)10 tahun diprediksi pada level 7,85 persen.

4) Harga

- (4) Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 90 US Dollar per barel. Di sisi lain, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 660 ribu barel per hari dan 1,05 juta barel setara minyak per hari.
 - (5) Pemulihan ekonomi Indonesia dalam tren yang terus menguat, sektor-sektor strategis seperti manufaktur dan perdagangan tumbuh secara ekspansif, didukung oleh konsumsi masyarakat yang mulai pulih serta solidnya kinerja ekspor. Sementara neraca perdagangan telah mengalami surplus selama 27 bulan berturut-turut. Sektor manufaktur yang mengalami pemulihan kuat, berperan menopang tingginya kinerja ekspor nasional. Hal ini mencerminkan keberhasilan strategi hilirisasi industri sejak 2015. Tingginya kinerja ekspor juga didukung oleh sektor pertambangan seiring meningkatnya harga komoditas global.
 - (6) Pada sektor transportasi dan akomodasi yang paling terdampak pandemi mulai mengalami pemulihan. Masing-masing tumbuh 21,3 persen dan 9,8 persen pada Triwulan II 2022. Pada Juli 2022, Indikator *Purchasing Managers' Index (PMI)* meningkat menjadi 51,3 persen, mencerminkan arah pemulihan yang semakin kuat.
- k) Dalam rangka menjaga menjaga stabilitas ekonomi makro dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional ditengah perlambatan ekonomi dunia, kebijaksanaan moneter dititik beratkan pada kestabilan tingkat suku bunga dan pengendalian inflasi, namun disatu sisi kebijaksanaan penerbitan suku bunga obligasi, suku bunga nasional (SBN) dari ORI yang tidak disertai pengawasan yang baik, sehingga menguras devisa negara untuk membayar bunga.
- l) Potensi sumber Daya Energi dan mineral pada tahun 2024 secara nasional diperkirakan akan semakin berkurang disebabkan karena ketersediaan sumber daya energi dan mineral yang semakin berkurang seiring tingginya permintaan pasar internasional disamping lokasi sumber energi dimaksud sangat terbatas dan sebagian besar berada dalam kawasan hutan lindung yang harus tetap dilestarikan untuk mencegah kerusakan lingkungan. Dan sebagai sulusnya pada tahun 2023 penggunaan mobil Listrik akan terealisasi walaupun masih dalam tahap pengembangan.
- m) Isu.....

- m) Isu pertambangan mengalami stagnasi dengan tidak adanya investasi baru, karena hambatan-hambatan seperti Isu tumpang tindih lahan tambang dan hutan, lingkungan, otonomi daerah, fiskal, peraturan perundang-undangan yang kurang kondusif, jaminan kepastian hukum dan keamanan serta gangguan kegiatan pertambangan liar.
- n) Kebijakan industri otomotif kurang memberikan peluang tumbuhnya industri otomotif nasional, sehingga peningkatan kendaraan bermotor di Indonesia dipenuhi oleh merk asing, munculnya mobil murah dipasaran Indonesia sehingga penerimaan devisa negara berkurang untuk membayar royalti atas lisensi, disamping sebagian besar industri di Indonesia bermasalah terkait dengan pencemaran lingkungan, penegakan hukum masih lemah, sehingga dikhawatirkan kondisi ini akan terus berkelanjutan dan diperkirakan akan berdampak sosial yang luas.
- o) Kebijakan Liberalisme perdagangan menimbulkan beberapa kendala antara lain Meningkatnya tenaga kerja asing di sektor formal dan bidang jasa sehingga mempersempit peluang kerja bagi masyarakat pribumi itu sendiri karena kalah kompetisi / keahlian.
- p) Perdagangan Bebas ASEAN dan CHINA / Asean-China Free Trade Agreement (AC-FTA) mempengaruhi produk dalam negeri, dimana banyaknya produk dari China masuk ke Indonesia bersaing dengan produk dalam negeri khususnya produk jenis mainan anak-anak, elektronik, tekstil dan produk lainnya, dimana produk China harganya lebih terjangkau dengan kualitas baik, sehingga para konsumen cenderung lebih memilih produk asal China sehingga berdampak pada menurunnya omset pedagang khususnya industri kecil produk dalam negeri.
- q) Kenaikan jumlah kendaraan bermotor di Sumbar saat ini mengalami kenaikan yang fantastis (Jumlah tahun 2022 jumlah : R.2 sebanyak dan R4/6 2.536.336 unit yang mana mengalami kenaikan rata-rata setiap tahunnya sekitar 0.6 %. sedangkan penambahan jalan setiap tahunnya relatif stagnan / tidak ada penambahan menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas dan naiknya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas setiap tahun khususnya kota - kota besar di Sumbar.

r) Kebijakan

- r) Kebijakan Pemerintah menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) setiap tahunnya serta akan dihapuskannya subsidi bagi konsumen yang berlangganan 450 s/d 900 KWH terkait dengan makin menipisnya cadangan BBM di dalam negeri serta makin sulitnya bahan alternatif seperti batu bara di Indonesia sebagai bahan dasar pembangkit listrik hal ini diprediksi akan menimbulkan keresahan dan memicu aksi protes /unjuk rasa karena dinilai hal tersebut semakin memberatkan beban hidup masyarakat, selain itu kenaikan tersebut juga akan menambah beban pengusaha pasca kenaikan upah minimum Propinsi yang selalu dituntut oleh para buruh, sehingga dapat memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran karena pengusaha tidak sanggup lagi menjalankan usahanya/bangkrut.
- s) Pembangunan disektor pertanian masih banyak menghadapi kendala antara lain menyusutnya lahan pertanian subur yang tergusur oleh perumahan dan idustrialisasi yang belum diimbangi dengan pengembangan lahan pertanian baru serta upaya modernisasi pertanian belum sepenuhnya mendapat dukungan dari masyarakat petani dan ada kecenderungan petani masih senang dengan sistem tradisional.
- t) Potensi terjadinya illegal logging di Sumbar sangat besar yang berdampak dapat merugikan kekayaan negara, terjadi pengrusakan lingkungan hidup, bencana alam banjir yang merugikan masyarakat etap akan terjadi setiap tahunnya, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebijaksanaan otonomi daerah yang memberikan porsi lebih besar kepada daerah untuk mengelola sumberdaya alam di daerahnya disalah artikan sebagai kebebasan untuk dapat dimanfaatkan sumber daya alam hutan tanpa memperhatikan peraturan perundang- undangan serta kurangnya rasa tanggung jawab pejabat berwenang pada proses perijinan dalam pemanfaatan sumber daya hutan serta kurangnya pengawasan hutan serta lemahnya penegakan hukum dibidang kehutanan.
- u) Potensi sumber daya kelautan dan perikanan di sumatera barat belum dimanfaatkan secara optimal hal ini disebabkan karena kurangnya modal, kurang iptek yang handal, keterbatasan SDM, sarana dan prasarana penunjang lainnya masih jauh dari memadai sehingga para nelayan belum dapat maksimal untuk memanfaatkan potensi laut yang ada.

v) Keterbatasan

- v) Keterbatasan pemerintah pusat maupun daerah dalam menyediakan lapangan kerja di dalam negeri telah berdampak terhadap animo untuk mencari pekerjaan ke luar negeri secara legal maupun illegal, sehingga tidak sering terjadi permasalahan-permasalahan yang timbul khususnya pekerja yang bekerja di luar negeri, sedangkan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang No.39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar Negeri belum terimplikasi secara baik/optimal.
- w) Pandemi Covid-19 turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di dunia, tidak terkecuali di Sumbar, yang mana pertumbuhan ekonomi di Sumbar tumbuh 4,54 persen pada triwulan III 2022 dibandingkan dengan triwulan III 2021. Hal tersebut didorong oleh aktivitas pariwisata dan permintaan jasa angkutan terutama udara yang naik signifikan lebih dari 200 persen dibandingkan triwulan III 2021.

7) Sosial Budaya

- a) Pembangunan kehidupan umat beragama di sumbar telah mampu mempermudah, memperluas dan mengembangkan masyarakat untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing- masing, namun masih bersifat formalistik dan belum mampu meningkatkan keberimanan dan spritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, pemahaman dan implementasi ajaran agama belum berkembang secara baik, bahkan pada sisi tertentu mengalami penurunan, sehingga muncul gejala fanatisme sempit sehingga cenderung menggunakan agama untuk kepentingan tertentu (politisasi agama untuk kepentingan partai politik) atau munculnya aliran/kepercayaan baru yang dinilai sesat dan menyesatkan seperti yang pernah terkjadi di Sumbar antara lain:

- (1) Ajaran islam Jamaah/LDII.
- (2) Ajaran islam Darul Arqam.
- (3) Ajaran Ahmadiyah.
- (4) Ajaran Agama Bahai, aliran sesat sempalan Syiah.
- (5) Aliran pelindung kehidupan
- (6) Tauhid Ibrahim
- (7) BAB Kesucian

b) Kemajemukan.....

- b) Kemajemukan adat dan budaya daerah serta keindahan alam merupakan potensi nasional yang mempunyai daya tarik terhadap wisatawan asing untuk berkunjung di sumbar, namun apabila hal tersebut tidak dikelola dengan baik merupakan potensi timbulnya konflik ditengah-tengah masyarakat. Masyarakat Sumatera Barat/Minangkabau yang hidup dilingkungan adat dan budaya yang khas memiliki falsafah hidup adat yang berdasarkan “Adat Basandi sara’ dan sara’ basandi Kitabullah” yang artinya adat ditopang oleh Sara’ (Agama) dan agama ditopang oleh Kitabullah (Al-quran). Makna yang terkandung di dalamnya adalah bahwa setiap pola sikap dan pola tindak masyarakat akan selalu diukur dengan kepatutan menurut adat dan agama Islam. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa arus globalisasi juga telah ikut menerpa masyarakat Sumatera Barat yang berakibat terjadinya perubahan-perubahan sosial atau terjadi pergeseran status sosial di masyarakat sumbar, hal ini disebabkan karena membaurnya pendatang - pendatang dengan penduduk asli suku Minangkabau yang dapat berpotensi timbulnya konflik horizontal maupun vertikal.
- c) Transformasi budaya dalam proses modernisasi tidak dapat dihindarkan dan cenderung semakin berpengaruh luas pada sistem nilai, norma dan tata laku masyarakat yang dapat menimbulkan gejala krisis identitas, penamaan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang bersumber dari kebhinekaan masyarakat telah dilakukan secara berkelanjutan, namun belum mampu menjadi andalan untuk menangkal danmenyaringpengaruh budaya asing.
- d) Perkembangan masyarakat yang mengarah kepada sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa saat ini antara lain: Individualistis, Materialistis, konsumtif, perilaku anarkis destruktif, merosotnya nilai-nilai budi pekerti, kepedulian sosial, kegotong royongan, persatuan dan kesatuan bangsa, gaya hidup bebas serta menurunnya kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat.
- e) Organisasi masyarakat/LSM, UU keormas sebagai salah satu landasan hak-hak setiap warga negara untuk berkumpul dan berserikat, apabila pelaksanaannya tidak dilakukan sesuai dengan kaedah hukum dapat menimbulkan berbagai permasalahan antara lain: persaingan antar ormas yang dapat berujung pada bentrokan fisik antar kelompok/antar organisasi.

f) Pelanggaran.....

- f) Pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) khususnya yang berkaitan dengan perlindungan kaum perempuan dan anak didominasi oleh tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) disebabkan penerapan Konvensi Hak Anak (KHA) dan undang-undang perlindungan anak belum terealisasi dengan baik, akibatnya kasus kekerasan yang terjadi pada anak seperti Eksploitasi anak untuk bekerja sebagai pengemis, pekerja seks komersial, pelaku kriminalitas jalanan yg dilakukan anak-anak serta kekerasan berupa seksual, fisik dan phisikis yang dilakukan oleh orang tua kandung/tiri, teman, tetangga, guru dan keluarga lainnya cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.
- g) Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sumber Daya Alam strategis yang ada di daerah serta pemanfaatannya cenderung mementingkan perekonomian daerah pada jangka pendek serta masih terjadinya pengelolaan sumber daya alam secara illegal (penambangan liar dan kegiatan pertambangan yang tidak ramah lingkungan) yang dapat mengorbankan kepentingan jangka panjang dengan terjadinya kerusakan lingkungan hidup (pencemaran air, penurunan kondisi hutan, kerusakan DAS, kerusakan habitat ekosistem pesisir laut, ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan terjadinya pemanasan global).
- h) Kasus pertanahan di sumbar pada awalnya hanyalah merupakan persoalan hukum sederhana yang dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum adat setempat, namun dalam perkembangannya permasalahan pertanahan menjadi berkaitan dengan ekonomi, sosial, politik dan budaya yang dapat berdampak luas mengganggu stabilitas nasional, yang penanganannya harus diselesaikan secara komprehensif.
- i) Ketenagakerjaan, Aksi unjuk rasa elemen buruh dengan tuntutan peningkatan kesejahteraan dengan meminta kenaikan UMP/UMR diprediksi akan terus berlanjut setiap tahunnya sejalan dengan makin tingginya kebutuhan hidup sehari-hari yang dirasakan oleh masyarakat sehingga gaji buruh tidak seimbang dengan kebutuhan hidup sehari- hari .
- j) Peraturan Menteri Agama RI dan Mendagri No. 08 dan nomor 09 tahun 2006 Bab.IV pasal 13 dan 14 tentang pendirian tempat ibadah (penutupan tempat ibadah yang dinilai tidak memiliki izin) telah menimbulkan kontroversi di masyarakat antara yang pro maupun yang kontra, sehingga berakibat rentan terjadinya konflik antar penganut agama, yang merupakan potensi bagi timbulnya gangguan kamtibmas.

k) Potensi.....

- k) Potensi terjadinya kasus sengketa tanah di Sumatera Barat cukup tinggi dimana penyelesaiannya sangat rumit dan memerlukan waktu yang sangat panjang hal tersebut bila dibiarkan berlarut-larut berpotensi terhadap terjadinya gangguan kamtibmas berupa pendudukan tanah oleh massa, pencurian hasil kebun milik perusahaan pada saat panen oleh masyarakat, terjadinya pembakaran/pengrusakan aset perusahaan, sampai dengan terjadinya penganiayaan atau pembunuhan.
- l) Adanya organisasi/kelompok garis keras yang berada di wilayah Sumatera Barat yang kegiatannya senantiasa sering berseberangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang perlu diwaspadai walaupun beberapa organisasi tersebut sudah di bubarkan oleh Pemerintah di antara FPI namun organisasi – organisasi lain yang harus di waspadai Antara lain:
- Organisasi MMI (Majelis Mujahidin Indonesia)
 - Organisasi HTI (Hizburt Tahir Indonesia).
 - Organisasi KPSI (Komite Penegak Sariah Islam).
 - Organisasi FMPI (Forum Musyawarah Pembela Islam)
 - Organisasi GMM (Gerakan Muslim Minang).
 - Organisasi FMM (Forum Masyarakat Minang Kabau).
 - Organisasi Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara)
 - Presidium Alumni (PA) 212
- m) Maraknya akhir - akhir ini pemberitaan tentang pembentukan negara Khilafah di Indonesia dimana Khilafah Islamiyah merupakan konsep pemerintahan yang pada akhir-akhir ini kembali mengemuka dan menjadi tuntutan sebagian umat Islam. Mengemukanya kembali tuntutan umat Islam atas pelaksanaan dan pengelenggaraan negara yang didasarkan pada syariah Islam tidak bisa dilepaskan dari kegagalan kalangan nasionalis sekuler. Dalam perkembangannya konsep pembentukan negara khilafah islamiyah bertentangan dengan ideologi bangsa indonesia yang mendasarkan pancasila sebagai dasar negara bukan agama yang menjadi dasar negara. Di Sumatera Barat terdapat beberapa daerah yang mempunyai basis Khilafatul Muslimin maupun Negara Islam Indonesia diantaranya Kota Padang, Dharmasraya, Sijunjung, Solok, Bukittinggi, Tanah Datar, Payakumbuh, dan Lima Puluh Kota.

8) Keamanan

Permasalahan di bidang keamanan yang dapat berpotensi menimbulkan gangguan keamanan tahun 2024 meliputi:

- a) Tingkat kesadaran kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum yang masih rendah, sehingga pelanggaran hukum dianggap hal yang biasa dan adanya kecenderungan dalam menangani masalah keamanan dimana masyarakat bertindak main hakim sendiri.
- b) Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa masalah keamanan merupakan tugas aparat keamanan sehingga hal ini mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membangun sistem keamanan dilingkungan masyarakat.
- c) Kurangnya peran pranata sosial dalam membangun keamanan disertai anggapan bahwa masalah keamanan segalanya bisa diatur dan ditentukan adat setempat, serta tingkat pemahaman tentang keamanan dan kesadaran hukum masyarakat yang masih relatif rendah sehingga penerapan hukum positif menjadi kurang maksimal.
- d) Belum optimalnya penegakan hukum yang berkeadilan sehingga mempengaruhi kepercayaan sebagian masyarakat terhadap sistem penegakan hukum.
- e) Berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat baik yang bersumber dari kondisi sosial politik, sosial ekonomi maupun sosial budaya yang berdampak pada masalah keamanan.
- f) Adanya keterlibatan masyarakat sumbar dalam jaringan teroris Nasional baik berafiliasi dengan ISIS, Jamaah Islamiyah (JI) maupun Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang telah dilakukan penangkapan terhadap terduga terorisme oleh Densus 88 AT dan kemungkinan dalam pengembangannya masih adanya jaringan-jaringan terorisme lainnya yang belum tertangkap yang dapat menjadi ancaman baik berupa terror maupun tindak kejahatan lainnya di Wilkum Polda Sumbar.

Kerawanan daerah yang perlu mendapat perhatian.

Kerawanan daerah berdasarkan analisis jenis kejahatan yang terjadi di beberapa wilayah Kab/Kota di Sumbar dan menjadi prioritas untuk mendapat perhatian tahun 2024 antara lain:

- a) Polresta Padang kerawanannya adalah: Curat, Curas, Curanmor, Pembunuhan, Anirat, Perkosaan, Pengrusakan, Penipuan, Pembakaran/kebakaran, Narkoba, judi, tetorisme, Korupsi, Unjuk Rasa, dan Perkelahian antar Pelajar/tawuran, banjir/tanah longsor, gempa bumi / tsunami, angin puting beliung, pelanggaran OA dan Laka Lantas.
- b) Polres Padang Pariaman kerawanannya adalah: Curat, Curas, curanmor, judi, pencurian ikan, Perkosaan, Pembunuhan, Pengrusakan, Narkoba, Unjuk Rasa , terorisme, penyelundupan, perkelahian, ilegal loging gempa bumi/tsunami, banjir, longsor, angin puting beliung, karhutla dan Laka Lantas.
- c) Polres Pessel Kerawanannya adalah: Curat, Curas, Curanmor, Anirat, Pengrusakan, penipuan, pembakaran, judi, narkoba, Illegal loging, penyelundupan, Illegal Fishing, konflik lahan/perkebunan, gempa bumi dan tsunami, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, karhutla dan laka lantas.
- d) Polres Bukittinggi kerawanannya adalah: Curat, Curas, Curanmor, Pembunuhan, Anirat, Perkosaan, Pengrusakan, Penipuan, Narkoba, Unjuk Rasa, teror, Perkelahian antara Pelajar, Korupsi, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, angin puting beliung dan Laka Lantas.
- e) Polres Payakumbuh kerawanannya: Curas, Curat, Curanmor, Narkoba, Perjudian, Anirat, cabul, Unjuk rasa, penyelundupan, Teror, OA, tanah longsor, angin puting beliung dan laka lantas
- f) Polres Pasaman Barat kerawanannya adalah: Curat, curas, Curanmor, Pembunuhan, Anirat, Pengrusakan, Pembakaran / kebakaran, Narkoba, judi, perkelahian Antar Nagari, Illegal Loging, illegal Mining, Gempa bumi/tsunami, Konflik Sosial dan konflik Perkebunan, intoleransi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, karhutla dan Laka Lantas.
- g) Polres Solok kerawanannya adalah: Curat, Curanmor, Pembunuhan, Anirat, Pengrusakan, Pembakaran / kebakaran, Narkoba, Rusuh massal / antar nagari, Unjuk Rasa, Korupsi, Illegal Mining, Konflik Konflik lahan / perkebunan, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, karhutla dan Laka Lantas.

h) Polres.....

- h) Polres Dharmasraya kerawanannya adalah: Curat, curas, curanmor, penipuan, kebakaran/pembakaran, Illegal logging, illegal mining, perkelaian antara kampung, perkelahian antar suku, senpi/handak, Rusuh Massal, Narkoba , teror, Konflik lahan / perkebunan, intoleransi, tanah longsor, karhutla dan laka lantas.
- i) Polres Solok Kota kerawanannya : Curas, Curat, Curanmor, Unjuk rasa, kebakaran, perkosaan /pencabulan, kebakaran/pembakaran perkelahian antar kampung, narkoba, gempa bumi, banjir, tanah longsor, karhutla dan laka lantas.
- j) Polres Pariaman kerawanannya adalah: Curat, curas, curanmor, pengrusakan, penipuan, kebakaran, perjudian, Narkotika, korupsi, pencurian ikan, gempa/tsunami, banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan laka lantas.
- k) Polres 50 Kota kerawanannya adalah: Curat, Curas, Curanmor, Anirat, Perkosaan, Cabul, penipuan, Narkoba, Korupsi perkelahin antar Nagari, Unjuk Rasa, banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, karhutla dan Laka Lantas.
- l) Polres Solok Selatan kerawanannya: Illegal loging, Curas, Curat, Curanmor, pengrusakan, penipuan, perkelahian, kebakaran / pembakaran, senpi / handak, illegal logging, illegal minning, Rusuh massal, Konflik Lahan/Perkebunan, tanah longsor, karhutla dan laka lantas.
- m) Polres Tanah Datar kerawanannya adalah: Curat, curas, Curanmor, Pembunuhan, Anirat, Narkoba, Unjuk Rasa, Rusuh Masal / antar nagari, Korupsi, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, angin puting beliung, karhutla dan Laka Lantas.
- n) Polres Padang Panjang kerawanannya adalah: Curat, curas, curanmor, anirat, kebakaran/pembakaran, Narkoba, perkelahian antar pelajar, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, angin puting beliung dan laka lantas.
- o) Polres Agam kerawanannya adalah: Curat, Curas, Pembunuhan, Perkosaan, Narkoba, Unjuk Rasa, Rusuh Massa/Antar Nagari, Konflik Lahan/Perkebunan, Gempa bumi, gunung meletus, Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, karhutla dan Laka Lantas.
- p) Polres Pasaman kerawanannya adalah: Curat, Curas, Curanmor, Pembunuhan, Anirat, Pengrusakan, Pembakaran / kebakaran, Narkoba, judi, perkelahian Antar Nagari, Illegal Loging, Gempa Bumi, banjir, Tanah Longsor, karhutla dan Laka Lantas.
- q) Polres Sawahlunto kerawanannya adalah: Curat, Curanmor, Anirat, Pengrusakan, Pembakaran, Narkoba, Illegal Loging, Peti, tanah longsor, karhutla dan Laka Lantas.

q) Polres.....

- r) Polres Sijunjung kerawanannya: Illegal Logging, Illegal minning, curat, Curas, curanmor, Kebakaran, Narkoba, banjir, tanah longsor, Unjuk Rasa, Rusuh Massal, konflik Lahan/Perkebunan, intoleransi, karhutla dan laka lantas.
- s) Polres Mentawai kerawanannya adalah: Illegal Logging, penyelundupan, pencurian ikan, perkelahian, terorisme, pelanggaran OA, banjir/abrasi, gempa bumi, tsunami dan karhutla.

b. Analisis

Pelaksanaan tugas dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari internal dan eksternal, sehingga perlu untuk dilakukan identifikasi dan analisis agar dapat ditemukan formula yang tepat dalam menyusun kebijakan dan strategi. Penilaian AKIP Itwasda Polda Sumbar tahun 2023 oleh APIP Polda Sumbar mendapat kategori BB dengan nilai (72,75). Adapun kondisi eksternal yang dihadapi antara lain gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat semakin dinamis dan dapat terjadi setiap saat dan waktu sebagai dampak akibat pengaruh dari penyebaran *Covid-19*, perkembangan teknologi informasi dapat menimbulkan peluang kejahatan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi (kejahatan Siber). Masih dijumpai adanya kecenderungan masyarakat dalam menangani masalah keamanan bertindak dengan main hakim sendiri, sehingga berdampak buruk terhadap penegakan dan kepastian hukum. Tren peningkatan kejahatan, Curat, Curas, Curanmor, Penipuan, Narkoba dan Kriminal lainnya yang menuntut Polri untuk lebih optimal dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum.

2. Identifikasi Masalah

Pelaksanaan tugas Itwasda Polda Sumbar seiring dengan perkembangan lingkungan strategi global, nasional dan regional akan semakin berat dan kompleks. Tuntutan dan harapan masyarakat terhadap profesionalisme kinerja dan pelayanan di bidang kepolisian semakin tinggi, mengharuskan menyusun berbagai upaya dan aksi konkrit yang efektif dalam membantu mewujudkan Keamanan di Provinsi Sumatera Barat. Secara umum permasalahan di bidang keamanan yang akan dihadapi pada Tahun 2024 dan khususnya pada satker Itwasda Polda Sumbar adalah sebagai berikut:

2. Personel

- a. Personel yang dimutasikan ke jajaran Itwasda Polda Sumbar sebagai Parik/Auditor belum seluruhnya memiliki kompetensi di bidang auditing;
- b. Masih adanya beberapa pengawasan melekat para Kasatwil kepada satuan bawah dirasakan lemah sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran disiplin anggota serta penyimpangan pelaksanaan tugas;
- c. Masih adanya para pengguna anggaran/pelaksana kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan perencanaan anggaran (RPD) masing-masing Satker dan Satwil Polda Sumbar sehingga berdampak terhadap program dan kegiatan serta pencapaian target kinerja dengan output kegiatan yang menjadi belum optimal;
- d. Adanya penugasan yang bersifat tumpang tindih antara tugas yang telah dijadwalkan secara rutin dengan penugasan yang sifatnya kontijensi/darurat;
- e. Pelaksanaan tahapan pemilihan umum yang akan berlangsung pada akhir tahun 2023 dan berlanjut pada awal tahun 2024.

II. Tujuan dan Sasaran

1. Visi dan Misi

- a. Visi Polda Sumatera Barat dan Visi Itwasda Polda Sumatera Barat
 - 1) Visi Polda Sumatera Barat
“Terwujudnya Sumatera Barat yang aman dan tertib”.
 - 2) Visi Itwasda Polda Sumatera Barat
“Terwujudnya Penyelenggaraan Pengawasan, Audit, Reviu dan Klarifikasi secara professional”.
- b. Misi Polda Sumatera Barat dan misi Itwasda Polda Sumatera Barat
 - 1) Misi Polda Sumatera Barat
Dengan mempedomani arah kedepan sesuai visi Polri, maka langkah pencapaian sasaran strategis disusun dalam misi sebagai berikut:

a. Melindungi

- a) **Melindungi** keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat Sumatera Barat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azazi manusia;
 - b) **Melayani** kepentingan masyarakat di Sumatera Barat, memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat sesuai kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
 - c) **Mengayomi** dengan selalu berusaha memberikan contoh yang terbaik pada masyarakat Sumatera Barat, agar masyarakat Sumatera Barat bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik.
- 2) Misi Itwasda Polda Sumatera Barat
- sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, maka langkah pencapaian sasaran strategis disusun dalam misi sebagai berikut:
- a) Melaksanakan peningkatan kemampuan AP/IP yang berkualitas dan professional dengan mengikuti diklat secara bertahap dan berkesinambungan;
 - b) Melaksanakan kegiatan Audit Kinerja dan Audit dengan Tujuan Tertentu aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian;
 - c. Melaksanakan kegiatan Verifikasi terhadap adanya mutasi kepala satuan kerja ketempat yang baru sehingga pelaksanaan kinerja pejabat yang lama dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. Melaksanakan reuiu untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan melaksanakan evaluasi untuk tersedianya informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai;
 - e. Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung terhadap penyimpangan-penyimpangan dengan melakukan, klarifikasi, konfirmasi, pemeriksaan dan penelitian setiap pengaduan.

2. Tujuan jangka menengah

a. Tujuan Polda Sumatera Barat

- 1) Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Sumatera Barat;
- 2) Menegakkan hukum secara berkeadilan;
- 3) Mewujudkan Polri Polda Sumbar yang Profesional;
- 4) Modernisasi pelayanan Polri Polda Sumbar;
- 5) Menerapkan manajemen Polri Polda Sumbar yang terintegrasi.

b. Tujuan Itwasda Polda Sumatera Barat

1. Meningkatkan kemampuan APIP yang berkualitas dan professional;
2. Terlaksananya kegiatan Audit Kinerja dan Audit dengan Tujuan Tertentu sehingga dapat memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tugas dan fungsi Polda Sumbar;
3. Terselenggaranya kegiatan serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru secara transparan dan akuntabel;
4. Terselenggaranya kegiatan reviu dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan sehingga menghasilkan laporan satker yang berkualitas;
5. Terselenggaranya pelayanan dumas dan terselesainya dumas secara baik, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat.

3. Sasaran Prioritas Tahun 2024

a. Sasaran prioritas Polda Sumatera Barat tahun 2024

- 1) Mewujudkan Rasa Aman di Tengah Masyarakat dengan Memperkuat Stabilitas Harkamtibmas di Lokasi Rawan Kejahatan;
- 2) Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik Polri Polda Sumbar yang inovatif;
- 3) Meningkatkan

- 3) Meningkatkan Kepercayaan Publik melalui Penegakan Hukum yang Transparan dan Akuntabel;
 - 4) Meningkatkan Profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polri Polda Sumbar;
 - 5) Pemenuhan Sarana Prasarana dan Almatsus Polri Polda Sumbar yang modern;
 - 6) Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih melalui Optimalisasi Pengawasan yang Efektif Berbasis IT.
- b. Sasaran prioritas Itwasda Polda Sumatera Barat tahun 2024
- 1) Menjadikan personel APIP yang berkualitas dan professional;
 - 2) Seluruh satker dan satwil jajaran Polda Sumbar menjadi taat, hemat, efisien, dan efektif dalam pencapaian tugas dan fungsi;
 - 3) Setiap Kasatker dan Kasatwil yang akan melaksanakan serah terima jabatan dapat mempertanggungjawabkan kinerja pada bidang opsnal, SDM, sarpras, dan keuangan;
 - 4) Seluruh satker dan satwil jajaran Polda Sumbar yang direviu dan evaluasi sehingga laporan dapat diyakini;
 - 5) Setiap pengaduan masyarakat yang dilaporkan baik langsung maupun tidak langsung dapat ditindak lanjuti.

III. Arah kebijakan dan strategi Tahun 2024

1. Arah kebijakan dan strategi Polda Sumbar Tahun 2024

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polda Sumatera Barat Tahun 2024, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a. sasaran Prioritas I “Mewujudkan Rasa Aman di Tengah Masyarakat dengan Memperkuat Stabilitas Harkamtibmas di Lokasi Rawan Kejahatan“.

1). arah

- 1) arah bijak: meningkatkan peran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat guna mendukung keamanan dalam negeri melalui kegiatan peningkatan kemampuan deteksi aksi;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) meningkatkan kemampuan deteksi aksi (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) fungsi intelijen keamanan Polri dengan didukung oleh personel, anggaran dan teknologi intelijen terkini yang memadai guna menurunkan dan mengeliminasi setiap potensi gangguan keamanan dan konflik sosial;
(giat3112,3114,3115,3116,3117,3150/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins,prog4,giat2,indikator1);
 - b) melakukan penyelidikan dengan fokus pada potensi terorisme, ancaman aksi radikalisme dan pemetaannya;
(giat3143/progLidikSidik/SP1/SS2/IKUa/progQuickWins,prog6,giat1,indikator1);
 - c) meningkatkan penguatan pada program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan dalam mendukung Harkamtibmas;
(giat3128,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins,prog4,giat3,indikator1);
 - d) melanjutkan penelitian dan survei dalam rangka mendukung/berkontribusi dalam Indeks Kamtibmas Polri;
(giat5067/progDukma/SP1/SS5/IKPe/progQuickWins,prog7,giat1,indikator1);

- 2) arah bijak: menurunkan potensi kejahatan, gangguan Kamtibmas dan terorisme melalui kegiatan pencegahan yang proaktif;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) meningkatkan

- a) meningkatkan pembinaan dan penyuluhan serta sambang dalam memberikan konsultan dalam pemecahan masalah yang terjadi ditengah masyarakat;
(giat3114,3128,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/prog QuickWins,prog4,giat2,indikator1,2,3,4);
- b) melakukan pencegahan berupa kontra radikal, kontra narasi dan kontra ideologi terhadap penyebaran propaganda kelompok terorisme baik pada kanal-kanal media *online* maupun komunitas masyarakat yang rentan terpapar paham radikalisme dan terorisme;
(giat3143/progLidiksidik/giat3128,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins,prog4,giat2,indikator4);
- c) meningkatkan pelibatan peran *civil society* dan tokoh agama garis keras yang telah mengikuti program moderasi beragama dalam penanganan kasus terorisme;
(giat3143/progLidikSidik/giat3128,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/ progQuickWins,prog4,giat2,indikator1,2,3);
- d) melaksanakan kolaborasi dan sosialisasi dengan “*stakeholder*” dalam upaya pencegahan radikalisme terorisme dan melaksanakan pembinaan terhadap eks napi terorisme dan keluarganya;
(giat3143/progLidikSidik,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins,prog6,giat1,indikator3);
- e) menetralsir informasi negatif yang dapat mengganggu Kamtibmas dengan mengelola opini publik/*public opinion* guna meningkatkan kepercayaan masyarakat;
(giat3149/progDukma/SP1/SS5/IKPc/progQuickWins,prog2,giat3, indikator1);
- f) melaksanakan “*edukasi*” dan himbauan kepada masyarakat terkait pencegahan kejahatan;
(giat3149/progDukma/SP1/SS5/IKPg/progQuickWins,prog2,giat5, indikator1,2);
- g) meningkatkan

- g) meningkatkan kegiatan patroli wilayah rawan Kriminalitas, pelacakan dan penangkalan serta tempat Obvit/Obvitnas dan tempat pariwisata;
 (*giat3130,3131,5081/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins,prog5,giat5,indikator1c*);
- 3) arah bijak: meningkatkan kegiatan "*Pemolisian Prediktif*" dalam rangka *Harkamtibmas* untuk menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat (*Cooling System*) dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sambang terhadap kepada Toda, Toga dan Tomas serta masyarakat lainnya;
 (*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins,prog4,giat2,indikator1,2,3*);
- b) peningkatan pemberdayaan pengemban kewenangan kepolisian terbatas kepada Satpam dan Polsus;
 (*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins,prog4,giat1,indikator1,2,3,4*);
- c) pembinaan FKPM/Pokdar Kamtibmas dalam rangka mengembangkan program "*Polisi RW*" dan asistensi penguatan KBPPP;
 (*giat3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins,prog4,giat3,indikator1*);
- d) melanjutkan pelaksanaan sosialisasi Budaya Tertib Lalu Lintas;
 (*giat3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins,prog6,giat2,indikator1,2*);
- 4) arah bijak: mengedepankan penanganan konflik secara humanis; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan;
- a) mengoptimalkan peran para Bhabinkamtibmas dalam deteksi awal penanganan konflik sosial secara humanis;
 (*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins,prog4,giat4,indikator1*);

b) mengorganisasikan

- b) mengorganisasikan masyarakat untuk mengalihkan ketegangan atau potensi konflik sosial/politik dengan melakukan aktivitas positif;
(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins, prog4,giat2,Indikator4);
- c) penggelaran pasukan Korbrimob Polri dalam pengamanan konflik secara humanis pada titik masalah baik sebelum, saat dan pasca konflik;
(giat5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins, prog4,giat3,Indikator1,prog5,giat3,Indikator2);
- 5) arah bijak: meningkatkan Kamseltibcar dalam berlalu lintas guna memberikan rasa aman di tengah masyarakat saat terjadi kemacetan dan jam rawan kejahatan;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli;
(giat3130,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuick Wins,prog5,giat2,Indikator ,2);
- b) meningkatkan kegiatan patroli, penjagaan di wilayah rawan kriminalitas pada saat jam rawan serta berperan aktif mengajak masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas;
(giat3130,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuick Wins,prog5,giat2,Indikator1,2);
- c) meningkatkan kegiatan patroli dan penjagaan di tempat Obvit/Obvitnas dan tempat pariwisata saat jam rawan dalam rangka mendukung “*Pertumbuhan Ekonomi*” serta berperan aktif masyarakat dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas;
(giat3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins, prog5,giat2,Indikator3);
- 6) arah bijak: meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polri di wilayah rawan gempa, bencana dan “*Slum Area*”;

untuk

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) personel Brimob Polri yang mampu digerakkan dalam menghadapi “ketanggapsegeraan” dalam penanggulangan bencana keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan kriminalitas berintensitas tinggi, bencana serta wabah;
(*giat5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins, prog4,giat3,Indikator1*);
 - b) menyelenggarakan pelayanan bantuan kegiatan penanganan SAR terbatas oleh personil Sabhara, Brimob dan bantuan Satwa;
(*giat3130,5081,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/prog QuickWins,prog4,giat3,Indikator1*);
 - c) memetakan masyarakat desa/wilayah rawan gempa dan bencana oleh “Bhabinkamtibmas” guna memudahkan identifikasi masyarakat saat dan pasca bencana;
(*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins, prog4,giat4,Indikator1*);
 - d) bersama instansi terkait bekerjasama dalam penanganan pelayanan kesehatan dan “trauma healling” pada daerah rawan gempa dan bencana;
(*giat3072,progDukma,giat3110,progProfesionalismeSDM//SP1/SS3/ IKPa/SS5/IKPe/progQuickWins,prog4,giat2,indikator4*);
- 7) arah bijak: melaksanakan kegiatan pengamanan *event* nasional/ internasional tahun 2024;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi serta mengoptimalkan penggunaan kekuatan Brimob Polri dan fungsi Kepolisian lainnya yang mampu digerakkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta saat *event* nasional/internasional berlangsung;

(giat)

(*giat5079,5080,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins,prog5*);

- b) melaksanakan operasi kepolisian dan kegiatan pengamanan masyarakat pada *event* internasional, Tour D'Singkarak; (*giat3130,3133,5079,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins,prog5*);

- 8) arah bijak: meningkatkan penggelaran operasional kepolisian dalam rangka *back up* kewilayahan untuk pengamanan unjuk rasa; penanganan konflik sosial; dan menjalin sinergisitas dengan *stakeholder* terkait dari gangguan keamanan;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) membangun sinergisitas dengan satuan kewilayahan dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara aktif guna mewujudkan situasi keamanan dalam negeri yang kondusif; (*giat5076, 5087, 5080/ progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins, prog5, giat3,indikator2*);
- b) melaksanakan pengamanan kegiatan masyarakat; (*giat3130,3131,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins,prog5,giat3,indikator2*);
- c) melaksanakan kegiatan pengamanan di kawasan obvitnas dan objek tertentu; (*giat3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins, prog5,giat2,indikator3*);
- d) melaksanakan kegiatan *back up* pelayanan pelacakan dan penangkalan di daerah rawan kriminalitas dan bahaya Narkoba; (*giat5081/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins,prog4*);

- 9) arah bijak: meningkatkan kerja sama Kepolisian dalam guna mendukung Harkamtibmas;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

Melaksanakan

melaksanakan kerja sama antara Polri dan Kementerian/Lembaga dalam rangka meningkatkan kerja sama antarlembaga, serta sinergi dengan “*stakeholder*” terkait;

(giat3120/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins,prog5)

- 10) arah bijak: meningkatkan pengeluaran patroli kapal guna mendukung kegiatan keamanan laut; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan;

meningkatkan kegiatan patroli kapal Polri di seluruh wilayah perairan dan sepanjang garis pantai untuk melaksanakan pengamanan perairan dan penegakan hukum;

(giat3134,4342/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuick Wins,prog5,6)

- 11) arah bijak:melaksanakan pengamanan tahapan Pemilu/Pemilukada tahun 2024;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melaksanakan kegiatan pengamanan tahapan Pemilu/ Pemilukada meliputi: Patroli, Penjagaan, Pengawasan peserta Pemilu/Pemilukada tahun 2024;

(giat,3130/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins, prog5,giat1,indikator1,2);

- b) penyelenggaraan pengamanan objek vital (kantor KPU);

(giat3130,3131,3135/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/prog QuickWins, prog5,giat1,indikator1,2);

- c) melaksanakan pengamanan tahapan Pemilu/Pemilukada tahun 2024 guna menjamin netralitas Polri serta mengantisipasi meningkatnya kejahatan yang berskala ke intensitas tinggi;

(giat5087/ progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins, prog5 ,giat1, indikator1,2);

d) melaksanakan

- d) melaksanakan perencanaan operasi kepolisian dalam rangka pengamanan tahapan Pemilu/Pemilukada tahun 2024;
(giat5079/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins, prog5,giat1,indikator1,2);
 - e) melaksanakan penindakan dan penegakan hukum dalam sidik-lidik tindak pidana Pemilu/Pemilukada tahun 2024;
(giat3142/progLidikSidik/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins,prog6, giat1,indikator1,2);
- 12) arah bijak: meningkatkan penguatan Polri di bidang pengamanan pulau berpenghuni;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) membangun kemampuan kolaborasi operasional Polri dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di pulau berpenghuni serta meningkatkan kegiatan pengawasan (pre-emptif, preventif dan melakukan penegakan hukum awal) terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah PLBN baik darat maupun laut;
(giat,3130,5087,3134/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/prog QuickWins,prog5,6);
 - b) meningkatkan kegiatan patroli,penjagaan dan pelacakan diwilayah rawan kriminalitas serta obvit/ obvitnas dalam rangka penguatan Polri diperbatasan dan pulau berpenghuni;
(giat3130,3131,3135,5081/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/ progQuickWins,prog5,6);
- b. sasaran prioritas II “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Polri yangInovatif”,
- 1) arah bijak: mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana pada sentra pelayanan publik Polri yang berbasis TIK;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) peningkatan

- a) peningkatan pelayanan *Online* yang terintegrasi serta Pelayanan Keliling di Bidang Lalu Lintas yang lebih menjangkau masyarakat dan Pelayanan Identifikasi sebagai alat kontrol dan data Forensik Kepolisian;
(giat3133/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKUa/ProgQuickWins, prog7,giat1,indikator4);
 - b) mengoptimalkan kegiatan Registrasi dan Identifikasi dengan memberikan jaminan Legitimasi atas kemampuan Pengemudi dan kendaraan bermotor;
(giat3133/progHarkamtibmas/giat3071,5055/progDukma/SP2/SS1/IKU1/ ProgQuickWins,prog7,giat1,indikator4);
 - c) melanjutkan inovasi layanan publik yang efisien dan terintegrasi guna mempercepat penerapan standar pelayanan minimal dilokasi *afirmatif* (menguatkan);
(giat3133,3071,3084,5055/progHarkamtibmas,progDukma/SP2/SS4/IKP4b/ProgQuickWins,prog7,giat1,indikator4);
- 2) arah bijak: meningkatkan profesionalisme anggota Polri dalam melayani masyarakat (alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan) guna meniadakan pungutan liar pada sentra pelayanan publik Polri meningkatkan kualitas pelayanan dengan memiliki parameter ukuran untuk perbaikan, menjaga *zero tolerance* terhadap penyimpangan; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan;
- a) melakukan inovasi digitalisasi pelayanan intelkam dan optimalisasi sistem pelayanan SKCK *online*;
(giat3112/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKUa/ProgQuickWins,prog7,giat1,indikator4);
 - b) melaksanakan penilaian kepuasan layanan kedokteran dan kesehatan Polri pada Dokkes jajaran;
(giat3072/progDukma/SP2/SS5/IKP5e/ProgQuickWins,prog2,giat1,indikator1);
 - c) mengoptimalkan

- c) mengoptimalkan proses integrasi *Binmas Online System (BOS) V2* dengan *Online Single Submission (OSS)* dalam penerbitan surat ijin operasional BUJP; (*giat5076/progHarkamtibmas/SP2/SS4/IKP4d/ProgQuickWins, prog2,giat1,indikator1*);
- 3) arah bijak: mengoptimalkan “*quick response*” kepolisian sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melanjutkan, melaksanakan Monev dan pengkajian terhadap aturan/SOP pelayanan publik yang masih berbelit-belit; (*giat4340/progDukma/SP2/SS5/IKP5g/ProgQuickWins,prog7, giat2,indikator1*);
- b) mengoptimalkan “*respon time*” dalam memberikan bantuan teknis Satwa dalam melakukan pelacakan dan penangkalan serta pencarian korban; (*giat5081/ progHarkamtibmas/SP2 /SS1/IKU1/ ProgQuickWins, prog2,giat1, indikator1*);
- c) meningkatkan pelayanan jasa pengamanan dan jasa sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu melalui pembinaan teknis (supervisi, asistensi, verifikasi) dan audit; (*giat3130,3131/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU1/ProgQuick Wins,prog7,giat1,indikator1*);
- c. sasaran prioritas III “Meningkatkan Kepercayaan Publik melalui Penegakan Hukum yang Transparan dan Akuntabel”
- 1) arah bijak: meningkatkan profesionalisme penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- c) meningkatkan

- a) meningkatkan koordinasi keamanan laut antarpenyidik di wilayah perairan Indonesia;
(*giat3134,4342/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb/ProgQuickWins,prog6*)
- b) melakukan penyelidikan yang berhubungan dengan hakikat ancaman tindak pidana terorisme, penindakan serta penyidikan tindak pidana terorisme berdasarkan penghormatan terhadap HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(*giat3143/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb/ProgQuickWins,prog6,giat1,indikator1*);
- c) meningkatkan pemberantasan 4 (empat) jenis kejahatan dengan prioritas tindak pidana Korupsi (pencegahan dan *asset recovery*), Narkoba (TPPU), Terorisme, Karhutla/LH serta Siber termasuk TPPO, kejahatan Kekerasan terhadap Perempuan dan anak
(*giat3140,3142,3143,3144,3151,3145,3146,5083,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb/ProgQuickWins,prog6,giat1,indikator1,2*);
- d) meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan perekonomian di bidang pangan, pertanahan, energi, investasi/perbankan (sektor keuangan);
(*giat3142,3145,5083/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb/ProgQuickWins,prog6,giat1,indikator1,2*);
- e) penanganan tindak pidana diperairan dalam mendukung kegiatan keamanan laut;
(*giat4342/progSidikLidik/SP3/SS2/IKUb/ProgQuickWins,prog6*);
- f) penanganan tindak pidana lalu lintas dalam rangka mewujudkan “Road Safety” serta Penegakkan Hukum melalui “ETLE” dan Tilang Manual;
(*giat3133/progHarkamtibmas,4343/progSidikLidik/SP3/SS2/IKUb/ProgQuickWins,prog6,giat2,indikator1,2*);
- g) melaksanakan penyelesaian perkara melalui “Restorative Justice” yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun pada kemanfaatan dan keadilan;
(*giat3142/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb/ProgQuickWins,prog6,giat1,indikator1,2*);
- h) penanganan

- h) penanganan kejahatan digital pada ruang siber (*cyber crime*) yang mengedepankan kualitas dan edukasi masyarakat. (*giat3151/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb/ProgQuickWins,prog6,giat1,indikator1,2*);
- i) penindakan hukum terbatas/Tipiring; (*giat3130/progHarkamtibmas/ SP3/SS2/IKUb/ ProgQuickWins, prog6 ,giat1,indikator1,2*);
- j) mempercepat penyelesaian perkara-perkara khususnya yang menjadi perhatian publik serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat;
(*giat3142,3143,3144,3145,3146,3151/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb/ProgQuickWins, prog6,giat1,indikator1,2*)
- k) memberikan bantuan teknis penyidikan dalam pengolahan TKP dan pemeriksaan barang bukti;
(*giat3140,3141/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb/ProgQuickWins, prog6,giat1,indikator1,2*)
- l) melaksanakan penanganan tindak pidana pemilu yang dilakukan Bersama-sama antara Bawaslu, Kejaksaan dan Polri dalam Sentra Gakkumdu;
(*giat3142/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb/ProgQuickWins,prog6,giat1,indikator1,2*)
- 2) arah bijak: melaksanakan pelatihan dan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kualitas dan kemampuan penyidik di era 4.0:
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
meningkatkan kualitas dan kemampuan pemeriksa baik Labfor dan Inafis dalam pengelolaan TKP untuk membuat terang perkara;
(*giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP3/SS3/IKPa/Prog QuickWins,prog3,giat1,indikator1*);
- 3) arah bijak: mewujudkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat:

untuk

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) memberikan *SP2HP2* kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir komplain dari masyarakat kepada Polri dibidang penegakan hukum menjunjung tinggi HAM sebagai bentuk pelayanan kepada pelapor/korban dan tersangka; (*giat3137,5086/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUa/ProgQuickWins, prog6*);
 - b) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan peran dari wassidik guna mengawasi proses penyidikan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (*giat5086/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUa/ProgQuickWins,prog6*);
 - c) mengoptimalkan *e-MP* (e-manajemen penyidikan) sebagai sarana pengawasan penyidikan perkara dan transparansi; (*giat5086/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUa/ProgQuickWins, prog6*).
- d. sasaran prioritas IV “Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polri”.

- 1) arah bijak: meningkatkan kualitas lulusan pendidikan Diklat Polri guna mewujudkan SDM Polri yang siap pakai di era *police 4.0*;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melanjutkan penguatan mutu lulusan Diklat Polri sesuai kebutuhan dan tantangan tugas; (*giat5068,5069/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPb/ProgQuickWins,prog3,giat1,indikator1*);
- b) meningkatkan latihan dan harkatpuan fungsi Dalmas dan Negosiator yang *Worldclass Standar* dalam rangka menghadapi tahapan pengamanan Pemilu tahun 2024; (*giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPb/ProgQuickWins,prog3,giat1,indikator1*);

c) meningkatkan

- c) meningkatkan pelatihan dalam penanganan konflik secara humanis bagi anggota Brimob, Samapta dan Binmas yang “*Worldclass Standar*” dalam rangka menghadapi tahapan pengamanan Pemilu tahun 2024; (*giat3100,5076,3130,5087/progProfesionalismeSDMpolri, progHarkamtibmas/ SP4/ SS3 /IKPb/ ProgQuickWins, prog3,giat1, indikator1*);
- d) meningkatkan kapasitas SDM bidang Siber Polri, kualitas dan kuantitas SDM bidang digital forensik yang *Worldclass Standar* dalam rangka menghadapi tahapan pengamanan Pemilu tahun 2024; (*giat3100,3151, 3141/progProfesionalismeSDMPolri,LidikSidik/ SP4/SS3/IKPb/ProgQuickWins,prog3,giat1,indikator1*);
- e) Melaksanakan peningkatan kemampuan kedokteran dan kesehatan serta keterampilan bagi personel jajaran Dokkes Polri; (*giat3072,3100/progDukma,progProfesionalismeSDM/SP4/SS3/ IKPb/ProgQuickWins,prog3,giat1,indikator1*);
- f) meningkatkan kualitas dan kapabilitas Verifikator dan APIP dilingkungan Polri dalam upaya tertib administrasi keuangan serta mengurangi dan mencegah terjadinya korupsi; (*giat3068,3091/progDukma/SP4/SS3/IKPb/ProgQuickWins,prog3, giat1,indikator1*);
- 2) arah bijak: mengoptimalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; (*giat5052/progDukma/SP4/SS5/IKPe/ProgQuickWins,prog2*);
- b) mewujudkan

- b) mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya;
(*giat5053/progDukma SP4/SS5/IKPe/ProgQuickWins,prog2*);

- 3) arah bijak: meningkatkan kualitas SDM Polri yang unggul dan humanis di era *Police 4.0*;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melanjutkan pemantapan program proaktif rekrutmen guna memperoleh anggota Polri yang berkualitas secara terpadu dan berbasis T.I (*Affirmative Action, Talent Scouting dan Reward*);
(*giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa/Prog QuickWins,prog8,giat2,indikator1,2*);
- b) melanjutkan penyusunan manajemen talenta persiapan kader unggul yang dapat berkompetitif;
(*giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa/Prog QuickWins,prog3*);
- c) melanjutkan penyiapan kader pimpinan Polri yang bersih dan bebas dari praktik KKN;
(*giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa/Prog QuickWins,prog3*);
- d) melaksanakan rekrutmen Pegawai Negeri pada Polri berdasarkan kebutuhan organisasi dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) serta mengalokasikan rekrutmen PNS Polri yang mengakomodir kelompok berkebutuhankhusussertaan berbasis teknologi informasi dengan sistem normal growth untuk memperoleh calon anggota Polri yang berkualitas, dengan target pemenuhan personel(rekrutmen) tahun 2024;

e) melaksanakan

- e) melaksanakan melaksanakan seleksi Dikbang Pegawai Negeri pada Polri untuk meningkatkan kompetensinya tahun 2024;
(giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa/Prog QuickWins,prog3);
- f) melaksanakan seleksi dikbangum dengan menggunakan penilaian 13 komponen serta membangun sistem penilaian kompetensi personel Polri secara objektif;
(giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa/Prog QuickWins,prog3,giat1,indikator1);
- g) melaksanakan reformasi pengelolaan SDM secara profesional guna menyiapkan pimpinan Polri yang dapat menjadi teladan, melayani dan transformatif;
(giat3104/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa/Prog QuickWins,prog3,giat1,indikator1);
- 4) arah bijak: meningkatkan kerja sama pendidikan di dalam negeri untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan rintisan dan perpanjangan MoU Kermadik Dagri;
(giat3100/progProfesionalismeSDMPolri(giat3100/ (giat3100/progProfesionalismeSDMPolri//SP4/SS3/IKPa/Prog QuickWins,prog3);
- b) melanjutkan kerja sama dengan Lembaga/Asosiasi sertifikasi dalam negeri;
(giat3100,3120,3122/progProfesionalismeSDMPolri,prog Harkamtibmas/SP4/SS3/IKPa/ProgQuickWins,prog3);
- c) menyelenggarakan kerja sama dengan *stakeholder*, terkait penerimaan dan seleksi pegawai negeri pada Polri secara proaktif, bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) serta *clear and clean* dengan menggunakan *CAT (Computer Asisted Test)* ditingkat Polda;
(giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa/Prog QuickWins,prog3);
- 5) arah

- 5) arah bijak: melaksanakan sistem manajemen karier berbasis kinerja.
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melanjutkan penyempurnakan standar penilaian kompetensi serta memberikan kredit/poin dalam penilaian kinerja berdasarkan spesifikasi penugasan dan wilayah serta meningkatkan “*system reward and punishment*” serta sistem *reward* terhadap kualifikasi personil Polri yang mampu mengaktualisasi diri lebih baik dalam keilmuan dan kehidupan masyarakat;
(*giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa/Prog QuickWins,prog3*);
 - b) membangun sistem penilaian kompetensi Polri (*kompetensi teknis, kompetensi kepemimpinan dan kompetensi etik*) yang komprehensif melingkupi perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi guna mendukung “*program manajemen talenta*” serta memperkuat penempatan lulusan Akpol di fungsi Binmas;
(*giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa/Prog QuickWins,prog3*)
 - c) optimalisasi Sistem Manajemen Kinerja *online* dengan SIPP guna menerapkan *Merit System* dalam manajemen pembinaan karier dalam rangka memberikan kesempatan yang sama dalam berkarya;
(*giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa/Prog QuickWins,prog3*);
- 6) arah bijak: meningkatkan kesejahteraan SDM Polri melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja:
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) meningkatkan pelayanan administrasi berkaitan dengan BPJS dan Asuransi Jamkestama bagi anggota Polri dan masyarakat;
(*giat3072/progDukma/SP4/ SS5/IKPe/ProgQuickWins,prog7*);
 - b) mengoptimalkan

- b) mengoptimalkan pelayanan secara proaktif dalam pemberian tanda kehormatan kepada pegawai pada Polri yang gugur/tewas dalam tugas menumbuhkan budaya melayani yang nondiskriminasi dan *user friendly*;
(*giat3072,3105/progDukma,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS5/IKPe/ProgQuickWins,prog7*);
- c) melanjutkan peningkatan standar akreditasi rumah sakit Bhayangkara melalui Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS);
(*giat3072,5062/progDukma/SP4/SS5/IKPe/ProgQuickWins,prog7*)
- e. Sasaran Prioritas V “Pemenuhan Sarana Prasarana dan Almatus Polri yang Modern:
- 1) arah bijak: memenuhi sarana dan prasarana dan Almatus Polri yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pemenuhan almatus Polri yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung penggelaran operasional dalam rangka penanganan penyelidikan, pengindraan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, konflik sosial, lawan insujensi dan pemeliharaan keamanan;
(*giat5060,3084/progModernisasiAlmatusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8*);
- b) pemenuhan peralatan, materiil registrasi dan identifikasi Fungsi Lalu Lintas yang berbasis teknologi serta melanjutkan pembangunan BPKB dan STNK *online*;
(*giat3084,3133/progModernisasiAlmatusSarprasPolri,progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKPb/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8*);
- c) melanjutkan

- c) melanjutkan pengembangan Pembangunan Indonesia *Safety Driving Center*; (giat5062, 3133/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri,progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKPb/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8);
- d) melanjutkan dan meningkatkan pembangunan RTMC/TMC; (giat5060,5062,3133/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri2,progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKPb/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8);
- e) melanjutkan pembangunan/pemasangan *ETLE* guna menegakkan hukum secara transparan di jalan raya; (giat5060,3084,3133/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri,progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKPb/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8);
- f) pembangunan dan meningkatkan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan, baik ditingkat pusat maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada aparaturnya Polri dan masyarakat umum; (giat5060,5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8)
- g) melanjutkan pemetaan terhadap rencana kebutuhan Alpkamtibmas dan Almatsus Polri terkini (Min dan Maks); (giat5060,5051/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8)
- h) pemenuhan peralatan penanganan awal Bencana, Karhutla dan Banjir sesuai dengan karakteristik wilayah dalam rangka pertolongan pertama; (giat5060,3084/progModernisasiSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8);
- 2) arah bijak: pemenuhan rumah dinas pegawai Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran dan dan mendorong pembangunan rumah dinas termasuk di wilayah perbatasan;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) melanjutkan

- a) melanjutkan pembangunan fasilitas pergudangan, rumah dinas, flat dan rusun bagi personel Polri;
(giat5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8);
 - b) melanjutkan pembangunan rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya (poliklinik) yang dekat dengan personel dan masyarakat guna mendukung “Reformasi Sistem Kesehatan Nasional”;
(giat5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8)
- 3) arah bijak: membangun dan menyatukan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melanjutkan pengadaan sistem informasi kepolisian secara bertahap yang terintegrasi;
(giat3084/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8)
 - b) melanjutkan penataan infrastruktur layanan darurat / *hotline* kepolisian secara bertahap dengan nomor tunggal dalam rangka merespon dengan cepat pengaduan masyarakat;
(giat5055,5062/progDukma,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8)
- f. Sasaran prioritas VI “ Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih melalui Optimalisasi Pengawasan yang Efektif Berbasis IT”.
- 1) arah bijak: melanjutkan penguatan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis *online*;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) mengoptimalkan

- a) mengoptimalkan klarifikasi penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu yang berbasis IT;
(giat3091,3089/progDukma/SP6/SS5/IKPg/ProgQuickWins,prog8,giat3,indikator1a,b);
 - b) mengoptimalkan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online* guna penguatan efektivitas pengawasan internal dan eksternal Polri serta netralitas ASN Polri dalam Pemilu 2024;
(giat3091,3089/progDukma/SP6/SS5/IKPg/ProgQuickWins,prog8,giat3,indikator1a,b);
 - c) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas *eksternal* dengan berbasis IT;
(giat3091,3089/progDukma/SP6/SS5/IKPg/ProgQuickWins,prog8,giat3,indikator1a,b);
- 2) arah bijak: melanjutkan dan mengoptimalkan kegiatan Saber Pungli di lingkungan internal Polri;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melanjutkan dan meningkatkan sinergisitas dari Pokja Satgas Saber Pungli, Pokja UPP K/L dan Pokja UPP Pemda dalam memberantas Pungli serta pelaporan yang terintegrasi;
(giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKPg/ProgQuickWins,prog7,giat1,indikator2);
 - b) mendorong pelayanan publik polri secara *online*;
(giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKPg/ProgQuickWins,prog7,giat1,indikator1,2);
 - c) mengoptimalkan kerja sama antarlembaga dengan pihak-pihak terkait dalam mencegah Pungli;
(giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKPg/ProgQuickWins,prog7,giat1,indikator2);
 - d) melanjutkan

- d) melanjutkan pelaksanaan pengamanan (kegiatan, Personel, Baket) terkait rekrutmen pendidikan pembentukan: Bintara, Akpol dan SIPSS;
(giat3089,3090/progDukma/SP6/SS5/IKPg/ProgQuickWins,prog7, giat1, indikator2);
- e) melanjutkan pelaksanaan pengamanan (Kegiatan, Personel, Baket) terkait Pendidikan Pengembangan: SIP, Sespima, Sespimmen/PKN Tingkat 2, Sespimti/Lemhanas dan PKN Tingkat1;
(giat3089,3090/progDukma/SP6/SS5/IKPg/ProgQuickWins,prog7, giat1, indikator2);
- f) melanjutkan pelaksanaan kegiatan operasi Bersih diinternal dan disentra pelayanan publik polri baik terkait penanganan perkara pidana dan pelayanan publik (SIM, STNK,BPKB, SKCK);
(giat3089,3090/progDukma/SP6/SS5/IKPg/ProgQuickWins,prog7, giat1, indikator2);
- 3) arah bijak: melanjutkan dan meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polri:
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) meningkatkan peran serta seluruh anggota sebagai pengawas dan pemberi informasi terkait dugaan korupsi di tubuh Polri melalui Aplikasi *Whistle Blower System (WBS)*. Sinergi dan kolaborasi dengan lembaga pemeriksa eksternal serta aparat penegak hukum lainnya dalam upaya pencegahan korupsi;
(giat3089,3090,3091/progDukma/SP6/SS5/IKPd/ProgQuickWins, prog8,giat1,indikator1,2,3);
- b) melanjutkan sosialisasi “Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2017” tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Perkap Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
(giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKPd/ProgQuickWins,prog8,giat1, indikator1,2,3);
- 4) melanjutkan

- 4) arah bijak: meningkatkan tatakelola manajemen kinerja, perencanaan, penganggaran dan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel:
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) meningkatkan *monitoring* dan evaluasi dalam perencanaan dan penganggaran satker agar lebih efektif dan efisien dalam;
(*giat4339/progDukma/SP6/SS5/IKPf/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8*);
 - b) meningkatkan dan mengembangkan sinergisitas dalam *e-Jakstra* guna menyusun produk perencanaan dan penganggaran Polri (*Domren Kapolri, Rancangan Renja Polri dan Renja Polri*) guna menyelaraskan pembangunan dilingkungan Polri agar semakin berkualitas;
(*giat5051/progDukma/SP6/SS5/IKPf/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8*);
 - c) meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen antara fungsi Pengawasan, fungsi Perencanaan, fungsi Logistik, fungsi Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (*KPA*) selaku penanggung jawab tatakelola keuangan tingkat Satker;
(*giat3068,3091,4339,5054/progDukma/SP6/SS5/IKPf/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8*);
 - d) melaksanakan dan meningkatkan *monitoring* dan evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri Semester dan Tahunan;
(*giat3068,4339,3091/progDukma/ProgQuickWins prog1,2,3,4,5,6,7,8*)
 - e) melaksanakan analisis dan Evaluasi Kinerja dan anggaran sesuai SOP di bidang Pembinaan dan Operasional;
(*giat3068,4339,3091,5054/progDukma/SP6/SS5/IKPf/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8*);
- 5) arah bijak: melanjutkan penataan kelembagaan dan tata laksana Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri agar lebih efektif dan efisien;

Untuk

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melanjutkan dan melaksanakan Monev pemenuhan satu kecamatan satu Polsek secara bertahap serta mengubah dan mengevaluasi efektivitas kewenangan Polsek hanya untuk Harkamtibmas pada daerah tertentu (tidak melakukan penyidikan);
(*giat5052/progDukma/SP6/SS5/IKPd/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8*);
 - b) melanjutkan penguatan organisasi satuan kewilayahan sesuai dengan situasi Kamtibmas dan perkembangannya
(*giat5052/progDukma/SP6/SS5/IKPd/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8*);
- 6) arah bijak: meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri guna meraih berpredikat *WBK* dan *WBBM* dan peningkatan jumlah capaian satker/satwil Zona Integritas berpredikat *WBK* dan *WBBM*;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) menyelenggarakan bimbingan kepada unit penyelenggara pelayanan publik di seluruh unit kerja Polri untuk mempedomani kebijakan Forum Konsultasi Publik (FKP), sebagai wadah menampung aspirasi dari seluruh masyarakat/ stakeholder terkait kebijakan penyelenggaraan layanan publik yang diberikan oleh Polri, dalam rangka evaluasi kebijakan layanan guna mewujudkan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien berdasarkan aturan yang berlaku (terukur) dan sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat;
(*giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKPd/ProgQuickWins,prog7*);
- b) melanjutkan kegiatan asistensi penyelenggaraan pelayanan Publik di seluruh unit pelayanan publik Polres / Polresta / Polrestabes dan Polres Metro untuk mendorong adanya,

sesuai

sesuai dengan komponen standar pelayanan di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam rangka perbaikan unit pelayanan publik dan peningkatan indeks pelayanan publik Polri; (*giat5053/progDukmaSP6/SS5/IKPd/ProgQuickWins,prog7,giat2, indikator1*);

- c) melakukan bimbingan dalam keikutsertaan inovasi-inovasi Polri yang memenuhi syarat ke dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) agar program-program Polri berdampak langsung dalam membantu penanggulangan kemiskinan dan peningkatan investasi, agar lebih banyak peserta dari Polri yang berpartisipasi, sehingga lebih besar peluang untuk memperoleh kategori TOP 99/45 inovasi pelayanan publik; (*giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKPd/ProgQuickWins,prog7*);
- d) melanjutkan, mempertahankan dan meningkatkan capaian satker/satwil Zona Integritas yang sudah berpredikat WBK dan WBBM dan peningkatan jumlah capaian satker/satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM; (*giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKPd/ProgQuickWins,prog7*);
- e) meningkatkan pelaksanaan pengukuran kinerja dengan Indeks Tata Kelola (ITK) Polri berbasis *web* dan *mobile* secara *online* (ITK-O) tingkat Polres Metro/Polrestabes/Polresta/Polres dan satker Polda; (*giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKPd/ProgQuickWins,prog7*).

2. Arah kebijakan dan strategi Itwasda Polda Sumbar Tahun 2024

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Itwasda Polda Sumbar Tahun 2024, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a. Sasaran prioritas “Menjadikan personel APIP yang berkualitas dan professional”, yaitu:
 - 1) Melaksanakan peningkatan kemampuan APIP yang berkualitas dan professional dengan mengikuti diklat secara bertahap dan berkesinambungan;

Untuk

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- (a) Terselenggaranya Bimtek (Prog WA, giat 3073)
- (b) Terselenggaranya pelatihan dan kegiatan *knowledge sharing* dengan satker terkait dan mitra kerja Inspektorat (BPKP dan KPKNL) (Prog WA, giat 3073)

- b. Sasaran prioritas “APIP sebagai salah satu kontrol untuk menilai suatu fungsi dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat memberikan kontribusi peningkatan aspek kinerja meliputi efektif, efisien dan ekonomis pada satker dan satwil jajaran Polda Sumbar”, yaitu:

- 1) melaksanakan kegiatan Audit Kinerja dan Audit dengan Tujuan Tertentu aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan

- a) Terselenggaranya Audit Kinerja (Prog WA, giat 3091)
- b) Terselenggaranya Audit dengan tujuan tertentu (Prog WA, giat 3091)

- 2) Pemeliharaan kantor/pemeliharaan peralatan dan mesin.

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

Pemeliharaan peralatan kantor dan pemeliharaan kendaraan (Prog BP, giat 5059).

- c. Sasaran prioritas “setiap Kasatker dan Kasatwil yang akan melaksanakan serah terima jabatan dapat mempertanggungjawabkan kinerja pada bidang opsional, SDM, sarpras, dan keuangan”, yaitu:

melaksanakan kegiatan Verifikasi terhadap adanya mutasi kepala satuan kerja ketempat yang baru sehingga pelaksanaan kinerja pejabat yang lama dapat dipertanggungjawabkan;

Untuk

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

Terselenggaranya Verifikasi (Prog WA, giat 3091);

- d. Sasaran prioritas “seluruh satker dan satwil jajaran Polda Sumbar yang direviu dan evaluasi sehingga laporan dapat diyakini”, yaitu:

melaksanakan reviu atas laporan keuangan, reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), evaluasi AKIP, evaluasi Penilaian Mandiri Penyusunan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan evaluasi Zona Integritas (ZI) diharapkan menghasilkan laporan yang berkualitas;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

Terselenggaranya reviu dan evaluasi (Prog WA, giat 3073);

- e. sasaran prioritas “setiap pengaduan masyarakat yang dilaporkan baik langsung maupun tidak langsung dapat ditindak lanjuti”, yaitu:

Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung terhadap penyimpangan-penyimpangan dengan melakukan, klarifikasi, konfirmasi, pemeriksaan dan penelitian setiap pengaduan;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat (Prog WA, giat 3091, PPP Giat 1)

IV. Program, kegiatan dan Pagu Indikatif T.A. 2024

1. Program dan Kegiatan

- a. **Program BP** modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri.

1) Tujuan:

Terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan modernisasi sarana dan prasarana aparaturnya Polri khususnya pada Itwasda Polda

Sumbar guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi pembinaan dan operasional.

2) Kegiatan:

Dukungan manajemen dan teknis sarpras.

b. **Program BQ** pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

1) Tujuan:

Terpeliharanya Kamtibmas dan terwujudnya Kamdagri yang mantap guna mendukung pembangunan Nasional.

2) Kegiatan:

Dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

c. **Program WA** dukungan manajemen.

1) Tujuan:

Terwujudnya good governance dan clean government melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian, sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran serta integrasi lintas sector.

2) Kegiatan:

- a) Dukungan pelayanan internal perkantoran Polri;
- b) Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan.

2. Pagu Indikatif Itwasda Polda Sumbar T.A. 2024.

Alokasi pagu Indikatif Itwasda Polda Sumbar TA. 2024 sebesar Rp. **6.345.558.000,-** (enam milyar tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Program modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri Rp. 109.162.000,- (seratus sembilan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);

b. Program

- b. Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- c. Program dukungan manajemen Rp. 6.136.396.000,- (enam milyar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

V. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Itwasda Polda Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan T.A. 2024

Ditetapkan di: Padang
pada tanggal: 19 September 2023



INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA SUMBAR

Arif Rahman Hakim
ARIF RAHMAN HAKIM, S.H.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050542

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH



**RENCANA KERJA
ITWASDA POLDA SUMBAR
TAHUN ANGGARAN 2024**

Lampiran

KEPUTUSAN INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA SUMBAR
NOMOR: KEP/32/IX/REN.2.3./2023 TANGGAL 19 SEPTEMBER 2023

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH**



**RENCANA KERJA
ITWASDA POLDA SUMBAR
TAHUN ANGGARAN 2024**

RKKT

**KEPUTUSAN INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA SUMBAR
NOMOR: KEP/32/IX/REN.2.3./2023 TANGGAL 19 SEPTEMBER 2023**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH SUMATERA BARAT
 INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
 ITWASDA POLDA SUMBAR TA 2024

SASARAN STRATEGI		INDIKATOR KINERJA		TARGET	KET
SS1	Profesionalisme SDM Itwasda Polda Sumbar	IKU1	Indeks Profesionalitas SDM Itwasda Polda Sumbar	48	
		IKP2	Terselenggaranya diklat profesi oleh BPKP	14	
		IKP3	Terselenggaranya Bimtek	1	
SS2	Modernisasi teknologi Itwasda Polda Sumbar	IKP4	Persentase Pemenuhan Ketersediaan ADK pada Almatsum Itwasda Polda Sumbar	62%	
SS3	Sistem pengawasan Itwasda Polda Sumbar yang akuntabel guna mendukung tata Kelola pemerintah yang bersih dan melayani	IKP5	Nilai SAKIP	73,00	
		IKP6	Nilai Kinerja Anggaran	93,20	
		IKP7	Terselenggaranya Audit Kinerja	2	
		IKP8	Terselenggaranya Audit Tujuan Tertentu	17	
		IKP9	Terselenggaranya Verifikasi	27	
		IKP10	Terselenggaranya Reviu dan Evaluasi	5	
		IKU11	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	100%	

Ditetapkan di : Padang

pada tanggal :

Septemebr

2023

INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA SUMBAR



ARIF RAHMAN HAKIM, S.H.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050542

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH



**RENCANA KERJA
ITWASDA POLDA SUMBAR
TAHUN ANGGARAN 2024**

RKA-KL

KEPUTUSAN INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA SUMBAR
NOMOR: KEP/32/IX/REN.2.3./2023 TANGGAL 19 SEPTEMBER 2023

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
UNIT KERJA (678232) ITWASDA POLDA SUMBAR
ALOKASI Rp. 6,345,558,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
060.01.BP 5059 5059.EBA	Program Modernisasi Almtsus dan Sarana Prasarana Polri Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	1.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		109,162,000 109,162,000 109,162,000	
5059.EBA.994 002 AY	Lokasi : KOTA PADANG Layanan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 / 6 / 10	1.0 Layanan		109,162,000 109,162,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.010-Padang) - Kendaraan Roda 4	7.0 UNIT	12,400,000	86,800,000 86,800,000	RM
BB 523121	PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.010-Padang) - Kendaraan Roda 2	4.0 UNIT	2,250,000	9,000,000 9,000,000	RM
BH 523121	PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.010-Padang) - Pemeliharaan Personel Komputer - Pemeliharaan Printer - Mesin Foto Copy	6.0 UNIT 15.0 UNIT 1.0 UNIT	730,000 463,000 2,037,000	13,362,000 4,380,000 6,945,000 2,037,000	RM
060.01.BQ 3128 3128.EBA	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	1.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		100,000,000 100,000,000 100,000,000	
3128.EBA.962 003 AD	Lokasi : KOTA PADANG Layanan Umum Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan RAPAT-RAPAT KOORDINASI/KERJA/DINAS/PIMPINAN KELOMPOK KERJA/KONSULTASI	1.0 Layanan		100,000,000 100,000,000	U
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.010-Padang) - Penginapan (JALDIS DALAM RANGKA DUK GIAT FUNGSI PENGAWASAN) [5 ORG x 16 GIAT x 1 MALAM] - Uang Harian (JALDIS DALAM RANGKA DUK GIAT FUNGSI PENGAWASAN) [5 ORG x 16 GIAT x 2 HARI]	80.0 OH 160.0 OH	490,000 380,000	100,000,000 39,200,000 60,800,000	RM
060.01.WA 3073 3073.EBA	Program Dukungan Manajemen Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		6,136,396,000 5,127,291,000 5,127,291,000	
	Lokasi : KOTA PADANG				

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
UNIT KERJA (678232) ITWASDA POLDA SUMBAR
ALOKASI Rp. 6,345,558,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3073.EBA.962	Layanan Umum	1.0	Layanan	466,022,000	
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			466,022,000	
AD	RAPAT-RAPAT KOORDINASI/KERJA/DINAS/PIMPINAN KELOMPOK KERJA/KONSULTASI			343,351,000	
521211	Belanja Bahan			215,391,000	RM
	(KPPN.010-Padang)				
	- Snack/Kudapan Rakernis Fungsi Pengawasan [135 ORG x 1 GIAT x 1 HARI x 1 KALI	135.0	OK 17,000	2,295,000	
	- Makan Konsultasi/Koordinasi bersama Instansi terkait [18 ORG x 6 GIAT x 1 HARI x 1 KALI	108.0	OK 25,000	2,700,000	
	- Snack/Kudapan Konsultasi/Koordinasi bersama Instansi terkait [18 ORG x 6 GIAT x 1 HARI x 1 KALI	108.0	OK 17,000	1,836,000	
	- Makan Rapat Klarifikasi Penanganan Dumas [15 ORG x 11 GIAT x 1 HARI x 1 KALI	165.0	OK 25,000	4,125,000	
	- Snack/Kudapan Rapat Klarifikasi Penanganan Dumas [15 ORG x 11 GIAT x 1 HARI x 1 KALI	165.0	OK 17,000	2,805,000	
	- Dukungan Kegiatan (PENINGKATAN KAPABILITAS APIP)	2.0	Giat 100,815,000	201,630,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			127,960,000	RM
	(KPPN.010-Padang)				
	- Penginapan (JALDIS DALAM RANGKA DUK GIAT FUNGSI PENGAWASAN) [2 ORG x 2 GIAT x 1 MALAM]	4.0	OH 530,000	2,120,000	
	- Uang Harian (JALDIS DALAM RANGKA DUK GIAT FUNGSI PENGAWASAN) [2 ORG x 2 GIAT x 2 HARI]	8.0	OH 380,000	3,040,000	
	- Biaya Transportasi JALDIS KE JAKARTA DALAM RANGKA GIAT		5,000,000	100,000,000	
	- RAKERNAS/RAKORWAS/DIKLAT/PELATIHAN [4 ORG x 5 GIAT]	20.0	OG		
	- Uang Harian (JALDIS KE JAKARTA DALAM RANGKA GIAT RAKERNAS/RAKORWAS/DIKLAT/PELATIHAN) [4 ORG x 5 GIAT x 3 HARI]	60.0	OH 380,000	22,800,000	
AG	SOSIALISASI			1,360,000	
521211	Belanja Bahan			1,360,000	RM
	(KPPN.010-Padang)				
	- Snack/Kudapan Sosialisasi DIPA RKA-K/L [40 ORG x 1 GIAT x 2 KALI]	80.0	OK 17,000	1,360,000	
BU	EVALUASI/LAPORAN KEGIATAN			48,095,000	
521211	Belanja Bahan			23,819,000	RM
	(KPPN.010-Padang)				
	- Snack/Kudapan Reviu LKIP Polda [8 ORG x 1 GIAT x 2 HARI x 1 KALI	16.0	OK 17,000	272,000	
	- KERTAS A4 (REVIU LKIP POLDA) [6 RIM x 1 KALI]	6.0	RIM 52,000	312,000	
	- TINTA (REVIU LKIP POLDA) [2 BTL x 1 KALI]	2.0	BTL 80,000	160,000	
	- Spanduk (EVALUASI/PENILAIAN SAKIP) [1 BUAH x 1 GIAT]	1.0	LMBR 300,000	300,000	
	- Snack/Kudapan Evaluasi/Penilaian SAKIP [114 ORG x 1 GIAT x 1 HARI x 1 KALI	114.0	OK 17,000	1,938,000	
	- Snack/Kudapan Evaluasi ZI [135 ORG x 1 GIAT x 1 HARI x 1 KALI	135.0	OK 17,000	2,295,000	
	- Snack/Kudapan Reviu/Revisi RKA-K/L [114 ORG x 1 GIAT x 1 HARI x 1 KALI	114.0	OK 17,000	1,938,000	
	- DUK GIAT REVIU LAPKEU [1 GIAT]	1.0	GIAT 1,814,000	1,814,000	
	- Snack/Kudapan Reviu Laporan Keuangan [145 ORG x 2 GIAT x 3 HARI x 1 KALI	870.0	OK 17,000	14,790,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
UNIT KERJA (678232) ITWASDA POLDA SUMBAR
ALOKASI Rp. 6,345,558,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.010-Padang)			24,276,000	RM
	- Penginapan (EVALUASI SERTA PELAKSANAAN PENILAIAN ZI) [4 ORG x 1 GIAT x 7 RES x 1 MALAM	28.0 OH	367,000	10,276,000	
	- Uangan harian (EVALUASI SERTA PELAKSANAAN PENILAIAN ZI) [4 ORG x 1 GIAT x 7 RES x 2 HARI	56.0 OH	250,000	14,000,000	
<i>DX</i>	<i>PENINGKATAN KEMAMPUAN PERSONEL SATKER</i>			9,236,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.010-Padang)			3,836,000	RM
	- Snack/Kudapan Bintek LHKPN [132 ORG x 1 GIAT x 1 HARI x 1 KALI	132.0 OG	17,000	2,244,000	
	- Spanduk (BINTEK FUNGSI PENGAWASAN)	1.0 LMBR	300,000	300,000	
	- Snack/Kudapan Bintek Fungsi Pengawasan [76 ORG x 1 GIAT x 1 HARI x 1 KALI	76.0 OK	17,000	1,292,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.010-Padang)			5,400,000	RM
	- Biaya narasumber/pemapar [6 ORG x 1 GIAT x 1 JAM]	6.0 OJ	900,000	5,400,000	
<i>E</i>	<i>PENYUSUNAN PROGRAM, ANGGARAN, DAN RENCANA KERJA</i>			782,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.010-Padang)			782,000	RM
	- KERTAS A4 (PENYUSUNAN RENCANA KERJA) [4 RIM x 1 KALI]	4.0 RIM	52,000	208,000	
	- TINTA (PENYUSUNAN RENCANA KERJA) [2 BTL x 1 KALI]	2.0 BTL	80,000	160,000	
	- JILID (PENYUSUNAN RENCANA KERJA) [10 BUKU x 1 KALI]	10.0 BTL	30,000	300,000	
	- MAP BIOLA (PENYUSUNAN RENCANA KERJA) [2 PACK x 1 KALI]	2.0 PACK	57,000	114,000	
<i>F</i>	<i>PENYUSUNAN RKA-K/L DAN DIPA</i>			2,016,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.010-Padang)			2,016,000	RM
	- KERTAS A4 (PENYUSUNAN PAGU DAN DATA PENDUKUNG) [4 RIM x 4 KALI]	16.0 RIM	52,000	832,000	
	- TINTA (PENYUSUNAN PAGU DAN DATA PENDUKUNG) [2 BTL x 4 KALI]	8.0 BTL	80,000	640,000	
	- MAP BIOLA (PENYUSUNAN PAGU DAN DATA PENDUKUNG) [1 PACK x 4 KALI]	4.0 PACK	57,000	228,000	
	- PULPEN (PENYUSUNAN PAGU DAN DATA PENDUKUNG) [2 KOTAK x 4 KALI]	8.0 KOTAK	23,000	184,000	
	- MATERAI (PENYUSUNAN PAGU DAN DATA PENDUKUNG) [11 BUAH]	11.0 BH	12,000	132,000	
<i>FS</i>	<i>DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER</i>			26,340,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.010-Padang)			26,340,000	RM
	- DUK GIAT (TAKLIMAT AWAL DAN AKHIR AUDIT KINERJA) [6 GIAT]	6.0 GIAT	3,200,000	19,200,000	
	- Snack/Kudapan Taklimat Awal dan Akhir Audit Kinerja [70 ORG x 6 GIAT x 1 HARI]	420.0 OG	17,000	7,140,000	
<i>G</i>	<i>PENYUSUNAN EVALUASI LKIP</i>			826,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
UNIT KERJA (678232) ITWASDA POLDA SUMBAR
ALOKASI Rp. 6,345,558,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.010-Padang)			826,000	RM
	- Snack/Kudapan Penyusunan Evaluasi LKIP Polda [10 ORG x 1 GIAT x 1 KALI]	10.0 OK	17,000	170,000	
	- KERTAS A4 (PENYUSUNAN EVALUASI LKIP ITWASDA) [3 RIM x 1 KALI]	3.0 RIM	52,000	156,000	
	- TINTA (PENYUSUNAN EVALUASI LKIP ITWASDA) [4 BTL x 1 KALI]	4.0 BTL	80,000	320,000	
	- JILID (PENYUSUNAN EVALUASI LKIP ITWASDA) [6 BUKU x 1 KALI]	6.0 BUKU	30,000	180,000	
JZ	<u>HONORARIUM SAI/SAKPA/SIMAK/SMAP/PENGELOLA KEUANGAN</u>			33,360,000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.010-Padang)			33,360,000	RM
	- Honor Operator SIRENA dan E-monev [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	300,000	3,600,000	
	- Honor PPK [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,800,000	21,600,000	
	- Honor Pejabat Pengadaan [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	680,000	8,160,000	
TV	<u>PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA</u>			656,000	RM
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.010-Padang)			656,000	
	- KERTAS A4 (PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024) [3 RIM x 1 KALI]	3.0 RIM	52,000	156,000	
	- TINTA (PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024) [4 BTL x 1 KALI]	4.0 BTL	80,000	320,000	
	- JILID (PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024) [6 BUKU x 1 KALI]	6.0 BUKU	30,000	180,000	
3073.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		4,661,269,000	U
001	Gaji dan Tunjangan			4,601,249,000	
A	<i>Pembayaran gaji dan tunjangan</i>			<i>4,601,249,000</i>	
511161	<u>Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang)			387,001,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri	1.0 THN	346,409,000	346,409,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	20,296,000	20,296,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	20,296,000	20,296,000	
511169	<u>Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang)			6,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri	1.0 THN	4,000	4,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,000	1,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,000	1,000	
511171	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang)			15,839,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri	1.0 THN	13,991,880	13,991,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	924,000	924,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	924,000	924,000	
511172	<u>Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang)			7,890,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri	1.0 THN	6,808,000	6,808,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	541,000	541,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	541,000	541,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
UNIT KERJA (678232) ITWASDA POLDA SUMBAR
ALOKASI Rp. 6,345,558,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511173	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang)			35,700,000	RM
	- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri	1.0 THN	30,600,000	30,600,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,550,000	2,550,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,550,000	2,550,000	
511175	<u>Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang)			2,105,000	RM
	- Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri	1.0 THN	1,779,000	1,779,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	163,000	163,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	163,000	163,000	
511176	<u>Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang)			17,236,000	RM
	- Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri	1.0 THN	17,236,000	17,236,000	
511179	<u>Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang)			71,749,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri	1.0 THN	71,749,000	71,749,000	
511193	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang)			10,650,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri	1.0 THN	10,290,000	10,290,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	180,000	180,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	180,000	180,000	
511211	<u>Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI</u> (KPPN.010-Padang)			2,209,267,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI	1.0 THN	1,961,461,000	1,961,461,000	
	- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI (gaji ke 13)	1.0 BLN	123,903,000	123,903,000	
	- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI (gaji ke 14)	1.0 BLN	123,903,000	123,903,000	
511219	<u>Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI</u> (KPPN.010-Padang)			28,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI	1.0 THN	24,000	24,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,000	2,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,000	2,000	
511221	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI</u> (KPPN.010-Padang)			130,486,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI	1.0 THN	115,360,000	115,360,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI (gaji 13)	1.0 BLN	7,563,000	7,563,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI (gaji 14)	1.0 BLN	7,563,000	7,563,000	
511222	<u>Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI</u> (KPPN.010-Padang)			46,768,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI	1.0 THN	41,830,000	41,830,000	
	- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI (gaji 13)	1.0 BLN	2,469,000	2,469,000	
	- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI (gaji 14)	1.0 BLN	2,469,000	2,469,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
UNIT KERJA (678232) ITWASDA POLDA SUMBAR
ALOKASI Rp. 6,345,558,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511223	<u>Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI</u> (KPPN.010-Padang)			300,740,000	RM
	- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI	1.0 THN	266,910,000	266,910,000	
	- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI (gaji ke 13)	1.0 BLN	16,915,000	16,915,000	
	- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI (gaji ke 14)	1.0 BLN	16,915,000	16,915,000	
511225	<u>Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI</u> (KPPN.010-Padang)			30,384,000	RM
	- Belanja Tunjangan PPh TNI/POLRI	1.0 THN	26,758,000	26,758,000	
	- Belanja Tunjangan PPh TNI/POLRI (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,813,000	1,813,000	
	- Belanja Tunjangan PPh TNI/POLRI (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,813,000	1,813,000	
511226	<u>Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI</u> (KPPN.010-Padang)			136,672,000	RM
	- Belanja Tunjangan Beras TNI/POLRI	1.0 THN	136,672,000	136,672,000	
511228	<u>Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI</u> (KPPN.010-Padang)			1,067,640,000	RM
	- Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI	1.0 THN	1,067,640,000	1,067,640,000	
511232	<u>Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/POLRI</u> (KPPN.010-Padang)			7,800,000	RM
	- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/POLRI	1.0 THN	7,000,000	7,000,000	
	- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/POLRI (gaji ke 13)	1.0 BLN	400,000	400,000	
	- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/POLRI (gaji ke 14)	1.0 BLN	400,000	400,000	
511244	<u>Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang)			19,800,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri	1.0 THN	17,850,000	17,850,000	
	- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	975,000	975,000	
	- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	975,000	975,000	
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.010-Padang)			103,488,000	RM
	- Golongan II (UANG LEMBUR) [1 ORG x 2 JAM x 11 HARI x 12 BLN]	264.0 OJ	17,000	4,488,000	
	- Golongan III (UANG LEMBUR) [6 ORG x 2 JAM x 11 HARI x 12 BLN]	1584.0 OJ	20,000	31,680,000	
	- Golongan II (UANG MAKAN LEMBUR) [1 ORG x 11 HARI x 12 BLN]	132.0 OH	35,000	4,620,000	
	- Golongan III (UANG MAKAN LEMBUR) [6 ORG x 11 HARI x 12 BLN]	792.0 OH	37,000	29,304,000	
	- Golongan II (UANG MAKAN LEMBUR POLRI) [5 ORG x 11 HARI x 12 BLN]	660.0 OH	35,000	23,100,000	
	- Golongan III (UANG MAKAN LEMBUR POLRI) [1 ORG x 11 HARI x 12 BLN]	132.0 OH	37,000	4,884,000	
	- Golongan IV (UANG MAKAN LEMBUR POLRI) [1 ORG x 11 HARI x 12 BLN]	132.0 OH	41,000	5,412,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			60,020,000	
<i>BW</i>	<i>PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR</i>			<i>60,020,000</i>	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.010-Padang)			60,020,000	RM
	- Bekal kantor	40.0 OT	1,500,500	60,020,000	
3091	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan			1,009,105,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
UNIT KERJA (678232) ITWASDA POLDA SUMBAR
ALOKASI Rp. 6,345,558,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3091.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	79.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		1,009,105,000	
3091.EBD.965	Layanan Audit Internal	79.0 Dokumen		1,009,105,000	
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			1,009,105,000	
CU	PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN			830,102,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.010-Padang)			3,710,000	RM
	- PULPEN (ATK PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN)	4.0 KOTAK	45,000	180,000	
	- PULPEN BOLINER (ATK PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN)	1.0 KOTAK	201,000	201,000	
	- PENSIL 2B (ATK PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN)	5.0 KOTAK	45,000	225,000	
	- TINTA PRINTER (ATK PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN)	9.0 BTL	80,000	720,000	
	- KERTAS A4 (ATK PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN)	10.0 RIM	52,000	520,000	
	- CETAK BUKU KERTAS KERJA (ATK PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN)	35.0 BUKU	26,000	910,000	
	- JILID (ATK PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN)	30.0 BUKU	30,000	900,000	
	- KERTAS F4 (ATK PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN) [1 RIM]	1.0 RIM	54,000	54,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.010-Padang)			752,892,000	RM
	- Penginapan Pamen (BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA PEMERIKSAAN PENGAWASAN DAN KEGIATAN INSIDENTIL PIMPINAN) [2 ORG x 6 GIAT x 18 RES x 1 MALAM	216.0 OH	489,500	105,732,000	
	- Uang Harian Pamen (BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA PEMERIKSAAN PENGAWASAN DAN KEGIATAN INSIDENTIL PIMPINAN) [2 ORG x 6 GIAT x 18 RES x 2 HARI	432.0 OH	320,000	138,240,000	
	- Penginapan Pama (BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA PEMERIKSAAN PENGAWASAN DAN KEGIATAN INSIDENTIL PIMPINAN) [2 ORG x 6 GIAT x 18 RES x 1 MALAM	216.0 OH	485,000	104,760,000	
	- Uang Harian Pama (BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA PEMERIKSAAN PENGAWASAN DAN KEGIATAN INSIDENTIL PIMPINAN) [2 ORG x 6 GIAT x 18 RES x 2 HARI	432.0 OH	320,000	138,240,000	
	- Penginapan Bintara (BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA PEMERIKSAAN PENGAWASAN DAN KEGIATAN INSIDENTIL PIMPINAN) [2 ORG x 6 GIAT x 18 RES x 1 MALAM	216.0 OH	480,000	103,680,000	
	- Uang Harian Bintara (BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA PEMERIKSAAN PENGAWASAN DAN KEGIATAN INSIDENTIL PIMPINAN) [2 ORG x 6 GIAT x 18 RES x 2 HARI	432.0 OH	320,000	138,240,000	
	- Duk Transportasi Laut/Kapal pemeriksaan dan pengawasan [4 ORG x 10 GIAT x 1 RES]	40.0 OG	600,000	24,000,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.010-Padang)			73,500,000	RM
	- Uang harian pemeriksaan dan pengawasan [5 ORG x 7 GIAT x 14 STKR x 1 HARI	490.0 HARI	150,000	73,500,000	
JZ	HONORARIUM SAI/SAKPA/SIMAK/SMAP/PENGELOLA KEUANGAN			64,913,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
UNIT KERJA (678232) ITWASDA POLDA SUMBAR
ALOKASI Rp. 6,345,558,000

Halaman : 8

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.010-Padang)			64,913,000	RM
	- Honor Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,900,000	22,800,000	
	- Honor Pejabat Penandatanganan SPM [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	709,450	8,513,000	
	- Honor Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	700,000	8,400,000	
	- Honor Staf Pengelola Keuangan [6 ORG x 12 BLN]	72.0 OB	300,000	21,600,000	
	- Honor Operator Persediaan [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	150,000	1,800,000	
	- Honor Operator Aset [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	150,000	1,800,000	
VJ	KEGIATAN 1 PRIORITAS POLRI			114,090,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.010-Padang)			45,840,000	RM
	- Makan (RAPAT PENANGANAN DUMAS TERPADU) [10 Orang x 1 Kali x 12 Bulan]	120.0 OK	35,000	4,200,000	
	- Snack (RAPAT PENANGANAN DUMAS TERPADU) [10 Orang x 1 Kali x 12 Bulan]	120.0 OK	17,000	2,040,000	
	- Uang Harian (RAPAT PENANGANAN DUMAS TERPADU) [10 Orang x 1 Kali x 12 Bulan]	120.0 OK	130,000	15,600,000	
	- Investigasi Dumas Terpadu (ATK) [1 GIAT x 12 Kali]	12.0 OK	1,000,000	12,000,000	
	- Rapat Penanganan Dumas Terpadu (ATK) [1 GIAT x 12 GIAT]	12.0 Giat	1,000,000	12,000,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.010-Padang)			6,300,000	RM
	- Sewa Kendaraan (INVESTIGASI DUMAS TERPADU) [1 Unit x 18 Hari]	18.0 Unit	350,000	6,300,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.010-Padang)			61,950,000	RM
	- Uang Harian Pamen DALAM KOTA [1 Orang x 3 Hari]	3.0 OH	150,000	450,000	
	- Uang Harian Pama DALAM KOTA [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	150,000	1,350,000	
	- Uang Harian Bintara DALAM KOTA [1 Orang x 3 Hari]	3.0 OH	150,000	450,000	
	- Uang Harian Pamen LUAR KOTA DALAM PROVINSI [1 Orang x 18 Hari]	18.0 OH	380,000	6,840,000	
	- Uang Harian Pama LUAR KOTA DALAM PROVINSI [3 Orang x 18 Hari]	54.0 OH	380,000	20,520,000	
	- Uang Harian Bintara LUAR KOTA DALAM PROVINSI [1 Orang x 18 Hari]	18.0 OH	380,000	6,840,000	
	- Penginapan Pamen LUAR KOTA DALAM PROVINSI [1 Orang x 17 Malam]	17.0 OH	300,000	5,100,000	
	- Penginapan Pama LUAR KOTA DALAM PROVINSI [3 Orang x 17 Malam]	51.0 OH	300,000	15,300,000	
	- Penginapan Bintara LUAR KOTA DALAM PROVINSI [1 Orang x 17 Malam]	17.0 OH	300,000	5,100,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama

2. P = Komponen Penunjang

3. * = Blokir

PADANG, 16 Mei 2023

ARIF RAHMAN HAKIM,S.H.

NRP 66050542